



UNIVERSITAS PERTAHANAN

TESIS

**PEMBINAAN TERITORIAL KODIM 0112/SABANG
PASCA PERJANJIAN HELSINKI
(Studi Komunikasi Sosial Dalam Upaya
Peningkatan Nasionalisme Masyarakat)**

Diajukan Oleh

**SUDRAJAT, AS
FTGP :120090101006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PERTAHANAN
JAKARTA
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORIENTALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Sudrajat, AS
FTGP : 120090101006

Tanda tangan :
Tanggal : 22 Juli 2010

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBINAAN TERITORIAL KODIM 0112/SABANG
PASCA PERJANJIAN HELSINKI
(STUDI PEMBINAAN KOMUNIKASI SOSIAL DALAM UPAYA
PENINGKATAN NASIONALISME MASYARAKAT)

Oleh
Nama : Sudrajat, AS
FTGP : 120090101006

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pertahanan pada program studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia.

Dipertahankan di Jakarta, Agustus 2010

1. Prof.Dr.Susanto, Zuhdi (.....) Pembimbing I
2. M.Supriyantno.B.Sc.M.Ed (.....) Pembimbing II
3. Prof.Dr.Dadang Gunawan (.....) Penguji I
4. Dr.Johanes Sulaiman (.....) Penguji II
5. Sonny ES. Prastyo. M.A (.....) Penguji III

Jakarta , Agustus 2010
Mengetahui
Komandan Sekolah Strategi Perang Semesta

Sonny ES Prasetyo, MA
Brigadir Jenderal TNI

ABSTRAC

SUDRAJAT.AS, FTGP.120090101006, Territory Construction of Post-Helsinki Agreement (Construction study Komsos Kodim 0112/Sabang Efforts to Improve the Folk Society). Thesis. Magister courses of Defense, Defense University. Jakarta.2010.

The purpose of this research are: To analyze how the integration of the Helsinki agreement with the building of the Territorial Army in particular TNI program implemented Kodim 0112 / provinces and to analyze the strengths and weaknesses of the territorial construction of post-Helsinki agreement made Kodim 0112 / provinces in order to increase nationalism. Qualitative research method using descriptive approach to literature, the TNI AD Binkomsos pelaksanaan provinces in the region with the attitude indicator and personal behavior, personal skills and concepts partnership.

Results of observation of these factors show that the strength and weakness of factors including: the ability early, the ability to report quickly and prevent early, and anatomical observation of the source of conflict in society and the ability of the use of territorial management, while there is power, and building and territorial, The new TNI continued, while the opportunity to cover communication method and communication skills. Against challenges in the construction of territorial Kodim 0112 / provinces covered: construction area and the ability of regional delegation.

ABSTRAK

SUDRAJAT.AS, FTGP.120090101006, Pembinaan Teritorial Pasca Perjanjian Helsinki (Studi Pembinaan Komsos Kodim 0112/Sabang Dalam Upaya Peningkatan Nasionalisme Masyarakat). Tesis. Program Studi Magister Pertahanan, Universitas Pertahanan. Jakarta.2010.

Tujuan penelitian adalah ; Untuk menganalisis bagaimana integrasi perjanjian Helsinki dengan pembinaan teritorial dalam program TNI Angkatan Darat khususnya yang dilaksanakan Kodim 0112/ Sabang dan Untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pembinaan teritorial pasca perjanjian Helsinki yang dilakukan Kodim 0112/ Sabang dalam rangka peningkatan nasionalisme.

Metode penelitian menggunakan kuantitatif, populasi peneliian adalah masyarakat Kota Sabang dengan rincian sampel 7 kelurahan, 1 Organisasi Keluarga Besar TNI dan 1 Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan total jumlah sampel 135 orang responden.

Hasil pengamatan terhadap nilai-nilai integrasi perjanjian Helsinki dengan pembinaan teritorial dalam program TNI Angkatan Darat khususnya yang dilaksanakan Kodim 0112/ Sabang dengan menggunakan pendekatan Pembinaan Komsos melalui ; Sikap perilaku personal, Kemampuan personal dan konsep *partnership*, dari hasil pengolahan terhadap 7 kelurahan dan 1 organisasi Keluarga Besar TNI dan Lembaga Sosial Masyarakat secara umum menyatakan bahwa dimensi sikap perilaku personel dengan penilaian rata-rata cukup baik, terhadap kemampuan personal dalam melakukan pembinaan juga dirasakan cukup baik walau, masih ada hambatan baik teknis maupun non teknis, serta untuk dimensi konsep *partnership*, terlihat cukup baik walau dalam dimensi ini belum adanya ikatan yang kokoh dan terintergal antara pemerintah daerah dengan pelaksana pembinaan teritorial TNI AD dalam hal ini Kodim 0122/Sabang.

Terhadap kekuatan dan kelemahan pembinaan teritorial memperlihatkan bahwa faktor kelemahan meliputi; kemampuan deteksi dini, kemampuan lapor cepat dan cegah dini, pengamatan terhadap sumber dan anatomi konflik dalam masyarakat serta kemampuan penggunaan manajemen teritorial, sedangkan kekuatan yang ada adalah; pembinaan teritorial dan pradigma baru TNI yang terus di sosialisasikan, sedangkan *oppertunity* (kesempatan) meliputi komunikasi sebagai metode dan komunikasi sebagai kemampuan. Terhadap tantangan kedepan dalam pembinaan teritorial Kodim 0112/ Sabang meliputi ; pembinaan wilayah dan kemampuan penugasan wilayah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Pembinaan Teritorial Pasca Perjanjian Helsinki (Studi Pembinaan Komsos Kodim 0112/Sabang Dalam Upaya Peningkatan Nasionalisme Masyarakat)”

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Pertahanan, Universitas Indonesia, Sekolah Strategi Perang Semesta.

Penyelesaian penulisan tesis ini tercapai berkat dukungan dan partisipasi serta motivasi baik langsung maupun tidak langsung, material dan non material dari semua pihak yang sudah membantu Penulis. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan ijinkanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Prof Dr. Susanto Zuhdi, sebagai Pembimbing penulis dan sebagai dosen senior yang saya hormati. Serta Bapak Bigjen.TNI. M.Supriyantno.B.Sc.M.Ed. selaku pembimbing teknis dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas bantuan Bapak selama ini yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk selalu belajar dalam berkarya, dan terima kasih banyak atas diskusi-diskusi yang sangat berharga selama ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih pula kepada:

1. Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Syarifudin Tippe,S.IP.,M.Si Rektor Universitas Pertahanan Kemhan RI Jakarta.
2. Bapak Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal, Hanafi Hambali.
3. Bapak Dandim 0112/Sabang, Letkol.Infantri, Joko Sudiono
4. Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Dadi Susanto,SH. selaku Dosen Pembimbing Materi.

5. Para Dosen Universitas Pertahanan Sekolah Strategi Perang Semesta, Jakarta.
6. Bapak Prof. Dr.Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Dirjen Pothan Kemhan
7. Bapak Brigadir Jenderal TNI Deden Suhardi, Sesditjen Pothan Kemhan
8. Bapak Brigadir Jenderal TNI Sonny ES Prasetyo, M.A Pit Komandan Sekolah Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Kemhan RI.
9. Bapak Marsma TNI DR.U.H.Harahap,M.Si Wadan SSPS Universitas Pertahanan Kemhan RI Jakarta.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada istri dan anakku serta orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan dorongan kepada penulis serta kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Pertahanan Kemhan RI Program Pasca Sarjana Magister Sekolah Strategi Perang Semesta pada khususnya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan balasan yang telah dilakukannya dan tetap memberkahi dan melindungi kita semua, amien.

Jakarta, Agustus 2010

Hormat kami,

SUDRAJAT.AS
FTGP.120090101006,

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lebar Pengesahan	ii
Abtrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Batasan Masalah	7
1.6 Model Operasional Penelitian	8
BAB II LANDASAN PUSTAKA	13
2.1. Perubahan Organisasi dan Reposisi TNI	13
2.1.1. Perubahan Organisasi	13
2.1.2. Pradigma Baru TNI	17
2.2. Konflik	25
2.3. Pembinaan Teritorial (Binter).....	31
2.3.1. Konsep Patner dalam Pembinaan Teritorial	33
2.3.2. Tujuan Profesionalisme Aparat Teritorial	35
2.3.3. Penetapan Model Pembinaan Teritorial	37
2.4. Komunikasi Sosial	38
2.4.1. Komunikasi Massa	38
2.4.2. Komunikasi Politik	40
2.4.3. Faktor-faktor Komunikasi Politik/Organisasi	41

BAB	III	METODOLOGI PENELITIAN	46
		3.1. Definisi Konseptual, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	46
		3.2. Disan Peneliian	47
		3.3. Data Yang Diperlukan	49
		Data Primer	50
		Data Sekunder.....	50
		3.4. Teknik Pengumpulan dan Penelitian	51
BAB	IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	54
		4.1. Kondisi Wilayah Kota Sabang Provinsi Aceh.....	54
		4.2. Kesepakatan Helsinki dan Implikasi	58
		4.3. Analisis	62
		4.4. Pembahasan	91
BAB	V	P E N U T U P	95
		4.1. Kesimpulan.....	95
		4.2. Saran-saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kisi-Kisi dan Variabel Peneliiian	47
Tabel 4.1 Sikap Prilaku Personel	64
Tabel 4.2 Kemampuan Pesonel	66
Tabel 4.3 Konsep Patnership	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ancaman disintegrasi merupakan ancaman yang sangat serius terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercermin oleh munculnya kelompok-kelompok separatis yang hingga saat ini belum terselesaikan, kemunculan sepratais dengan di tunjang oleh kekuatan-kekuatan politik secara nyata terlihat, GAM telah bermetamorfosa dalam perwujudan Partai Aceh (PA), metarfosa dari ulat menjadi kupu-kupu, bukanlah bentuk pertobatan totalitas pada NKRI, dimana metamorfosa adalah siklus dari strategi politik dalam bingkai peradaban yang lebih tinggi.

Penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, atau yang di sebut Perjanjian Helsinki memberikan dua harapan berbeda sisi, harapan pertama bagi NKRI adalah, perjanjian ini merupakan bentuk keseriusan untuk memperhatikan provinsi Aceh, dalam bingkai pembangunan berbangsa yang lebih baik hal, ini di wujudkan dengan di sahkannya Undang-undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Secara prinsip Aceh Pasca Helsinsi merupakan Aceh dengan warna baru, Aceh dengan harapan untuk melakukan penataan dan menyusul ketertinggalan dalam kerangka pembangunan NKRI, geliat pembangunan pasca tsunami dan Helsinsi merupakan satu kekuatan yang harus menjadi pemicu masyarakat Aceh untuk terus membangun seluruh sektor, karena aceh merupakan daerah terdepan dalam semenanjung Malaka, dengan pembangunan dan penguatan struktur masyarakat Aceh maka konsep ketahanan NKRI akan terus dipertahankan dan menjadi kekuatan yang tersinerji dengan pembangunan nasional. Di sisi lain perjanjian Helsinki membawa dampak yang tidak dapat dinamfikan mengingat metamorfosa dari sparatis menjadi Gerakan Aceh Merdeka dan saat ini menjadi Partai Aceh, dengan demikian metarfosis menjadi kekuatan politik.

GAM melalui Partai Aceh terus melakukan propokasi rakyat dengan berbagai cara mulai dari intimidasi sampai dengan pengembangan opini bahwa kemerdekaan Aceh hanya tinggal menunggu waktu (Dokumen Lampiran Atensi No.R/ /Lapat/I/2009. Kemenangan Partai Lokal (Partai Aceh) membawa permasalahan baru, sparatisme bentuk baru telah di kembangkan jauh lebih baik bila dibandingkan perlawanan senjata. Bentuk perlawanan konvensional terlihat berubah wujud ke media Politik yang jauh lebih beradab, dan memberikan spektrum yang jauh lebih luas. Kemenangan politik telah dicermati oleh Partai Aceh untuk menggantikan sistem, terlihat sangat kuat mulai dari keinginan mengganti seluruh Kepala Desa, Camat hingga pejabat lingkungan Pemda, hal ini sangat di mungkinkan mengingat dalam Nota Kesepemahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada butir 3.2.7 berbunyi “Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional. Tindakan profokasi terus di kembangkan dalam masyarakat bahwa Kemenangan Partai Aceh (PA) merupakan pintu gerbang bagi kemerdekaan Aceh dan PA tidak hanya partai politik namun alat perjuangan kemerdekaan.

Resistensi terhadap nasionalisme kian tampak dan hal ini dapat ditandai dengan kecilnya angka keikutsertaan PNS dan siswa dalam upacara bendera, serta terpaan teknologi komunikasi khususnya stasiun Televisi Malaysia dan Singapura yang mudah untuk di jangkau warga masyarakat bila di bandingkan dengan stasiun televisi nasional yang sulit untuk menjangkau kota Sabang. Indikator-indikator resistensi nasionalisme dapat dikatakan cukup banyak dan hal ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan dan dibebankan pada masyarakat.

Perjanjian Helsinki masih menyisahkan pertanyaan bagaimana dampak perjanjian tersebut terhadap pembinaan teritorial pasca konflik, mengingat bila dibandingkan masa sebelumnya pembinaan terus dilakukan namun pasca perjanjian pembinaan relatif kurang baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas sebagai akibat ditariknya pasukan penugasan. Kondisi ini ditambah dengan masih banyaknya eks pasukan GAM yang masih menggunakan senjata sebagai alat untuk melakukan kekerasan dan propaganda (Dokumen. Lapiroan Atensi No.R/

/Lapat/I/2009), dokumen ini secara jelas dan fakta memperlihatkan banyaknya senjata yang masih di pegang oleh eks tentara GAM sebagai indikasi kuat tidak semua senjata GAM telah di musnahkan 100% pemusnahan senjata hanya sebuah kamufase politik luar negeri GAM, masih adanya perhimpunan-perhimpunan yang melakukan rapat-rapat tertentu dengan indikasi memberikan tekanan terhadap NKRI, dan sekaligus memberikan peluang adanya upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan Aceh, Prof.Dr.Hikmahanto Juwono, SH.LL.M,Ph. Menyatakan bahwa “Perlu diadakanya sebuah pengujian terhadap kesetiaan para ekstokoh GAM kepada NKRI, seharusnya pemberian amesti kepada pimpinan dan anggota GAM yang berada di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan syarat pengucapan janji setiap kepada NKRI, selebih lanjut untuk menjalankan MoU berdasarkan tafsiran-tafsiran MoU yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat, seluruh tafsiran yang disampaikan dalam menyingkapi pasal-pasal kontroversial selalu berbasis pada peraturan perundang-undangan Indonesia, masih menurut Himahanto bahwa seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar pimpinan dan anggota GAM berikrar setia pada NKRI setelah mendapatkan amnesti atau abolisi perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kewajiban ikrarini merupakan tafsiran yang didasarkan pada bingkai NKRI, karena MoU tidak mengaturnya. Ikrar menjadi penting karena pemerintah harus menghindari situasi situasi dimana anggota dan pimpinan GAM menerima abolisi atau amesti tetapi tidak mengakui NKRI.

Perjanjian Helsinki, Otonomi Khusus dan keikutsertaa Partai Lokal (Parlok) dalam Pilkada, merupakan manifestasi yang memiliki arti luas, bagi seluruh sub komponen GAM, melalui gerakan-gerakan sebagaimana telah dijelaskan diatas, Partai Aceh (PA) yang merupakan embrio tunggal GAM memperoleh kemenangan mutlak diatas partai-partai nasional. Indikasi-indikasi ini merupakan satu bentuk upaya sistematis dan bila hal ini tidak dicermati, maka Timor-Timur tahap kedua akan terulang dan dengan sendirinya menghidupkan gerakan-gerakan sparatis yang di bingkai dengan gerakan politik.

Secara prinsip Aceh Pasca Helsinki merupakan Aceh dengan warna baru, Aceh dengan harapan-harapan untuk melakukan penataan dan menyusul ketertinggal dalam kerangka pembangunan NKRI, geliat pembangunan Pasca Sunami dan Helsinki merupakan satu kekuatan yang harus menjadi pemicu masyarakat aceh untuk terus membangun seluruh sektor, karena aceh merupakan daerah terdepan dalam semenanjung malaka, dengan pembangunan dan penguatan struktur masyarakat Aceh maka konsep ketahanan NKRI akan terus di pertahankan dan menjadi kekuatan yang tersinerji dengan pembangunan nasional.

Melihat kecerahan Aceh baru dengan warna kedamaian serta potensi aceh sebagai pintu gerbang nasional, maka wilayah-wilayah dalam demografi Aceh menjadi bagian integral dalam konsep pembangunan Aceh termasuk didalamnya Sabang sebagai garis awal memasuki wilayah NKRI, Demografi Kota Sabang terletak pada 05046 28 05054 28 Lintang Utara dan 95013 02 - 95022 36 Bujur Timur. Berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat, dengan luas wilayah keseluruhan 153 Km², memasuki dinamika baru Aceh pasca Helsinki dan kemengangan Partai Lokal serta Pimpinan (Pilkada) merupakan satu rangkaian babak baru seluruh dataran Aceh tidak terkecuali Kota Sabang. Hiporia Aceh dengan paradigma baru tentunya mewarnai kehidupan masyarakat kota Sabang, yang secara langsung berhadapan garis terluar NKRI dan Garis Utama Tapal Batas dengan negara-negara tetangga. Akankah paradigma Aceh baru terus mengerus rasa nasionalisme warga Kota Sabang dan hal ini terus menjadi tanda tanya dan perdebatan. Banyak desas-desus bahwa resistensi nasionalisme warga masyarakat khususnya warga Kota Sabang terus memudar, hal ini ditandai dengan kecilnya angka keikutsertaan PNS dan siswa dalam upacara bendera, serta terpaan teknologi komunikasi khususnya stasiun Televisi Malaysia dan Sinapura yang mudah untuk di jangkau warga masyarakat bila di dibandingkan dengan stasiun televisi nasional yang sulit untuk menjangkau kota Sabang, indikator-indikator resistensi nasionalisme dapat dikatakan cukup banyak dan hal ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan dan dibebankan pada masyarakat, untuk hal ini tanggung jawab menumbuhkembangkan nasionalisme merupakan tanggung jawab kolektik seluruh komponen bangsa termasuk didalamnya Kodim 0112/Sabang, Kodim 0112 Kota Sabang telah melaksanakan kegiatan pembinaan

territorial ke 18 kelurahan secara gencar telah dilaksanakan program terpadu dan, terarah dan terukur, meliputi sosialisasi MoU, UUPA, penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, wawasan kebangsaan, pembinaan penyuluhan pramuka, kegiatan anjang sana kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, karya bakti berupa pembersihan meunasah di kelurahan Cot Abeuk, Mesjid di keluarahan Batee Shok, Siruy dan Pondok Pesantren di kelurahan Paya Seunara, kiri kanan jalan di pemukiman pengungsi dan Ujong Sekundo. Juga kanal/parit di kelurahan kota Atas lingkungan babel Iman dan Lhok Panglima. Pembersihan lapangan bola dan mesjid di kelurahan iboh, pembersihan mesjid di kelurahan Beurawang, pembersihan lapangan bola di kelurahan Paya Seunara, pelebaran jalan di kelurahan Balohan, pembersihan lingkungan mesjid Babel Taqwa dan lapangan bola kaki di kelurahan Anoi Itam dan pembersihan jalan 1 Km di kelurahan Ujung Kareung. Pembuatan lapangan olahraga di kelurahan Anak Laot, membantu kaum dhuafa melalui pembangunan lantainisasi di kelurahan Cot Mancang Kota Bawah Barat, penyerahan sarana kontak berupa sajadah, bola voly, bolakaki dan net voly ke setiap kelurahan, pembagian paket lebaran terhadap warga tidak mampu di kelurahan Kota Bawah Timur, pengakuan terhadap para purnawirawan, penyerahan ternak warga yang tidak mampu, pemberian bibit padi di kelurahan Jaboy, ikut berpartisipasi dalam pameran pembangunan. Selain melaksanakan operasi pemberdayaan wilayah pertahanan, Kodim 0112/sabang beserta jajarannya secara sungguh-sungguh mengamankan perdamaian yang telah tercipta agar tetap dalam alam perdamaian secara menyeluruh, adil, permanen dan bermartabat.

Melemahnya ruang gerak TNI (Kodim 0112) sebagai akibat ditariknya Pasukan Penugasan, menjadi permasalahan kedua bagi kinerja pembinaan komunikasi sosial, dengan semakin melemahnya pembinaan wilayah pertahanan, tentunya memberikan akibat terhadap semakin melemahnya nasionalisme masyarakat. Sisi ini di perparah kesalahan Pembinaan Teritorial (Binter) yang dilaksanakan oleh TNI AD, kekeliruan tersebut antara lain 'Pembina Teritorial' yang sering diterjemahkan juga sebagai 'Penguasa wilayah'. Mentalitas seperti inilah yang menyebabkan Komunikasi Sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh aparat teritorial di wilayah tidak berjalan secara efektif. Dikotomi 'Pembina dan

yang dibina' akan mengakibatkan konotasi 'Penguasa dan yang dikuasai', dan hal ini jelas mengekspresikan strata kedudukan dalam status sosial yang tidak sejajar. Padahal, Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode dalam Pembinaan Teritorial memiliki esensi yang sangat fundamental jika dilihat dari definisinya yaitu (a) Komunikasi Sosial sebagai metode *dan* (b) Komunikasi Sosial sebagai kemampuan, dari penjelasan tersebut diharapkan 'terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan' merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan harus dibangun guna menciptakan aspek Geografi menjadi Ruang Juang, Demografi menjadi Alat Juang, serta Kondisi Sosial yang meliputi bidang *panca gatra* (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam) menjadi Kondisi Juang yang tangguh dalam konteks penyiapan sumber daya nasional untuk mendukung Sistem Pertahanan Semesta (SISHANTA).

Dalam perspektif tersebut, maka hal yang paling fundamental adalah terwujudnya kesepahaman diantara seluruh komponen bangsa bahwa Pembinaan Teritorial sebagai bagian dari urusan Pertahanan, merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, konsep *partnership* (kemitraan) dalam pembinaan teritorial para pemegang kepentingan (*stakeholders*) harus ada kesepakatan dan kesepahaman dalam penyusunan program, sehingga implementasi Binter dapat berjalan dan mendapat dukungan dari seluruh lapisan.

Pembinaan Teritorial dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD pada tataran Operasional dan Taktis. Hal ini tentunya telah dilaksanakan kodim 0112 Kota Sabang, melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial walau masih banyak sisi kekurangan, berkenaan dengan permasalahan ini dimana Kodim 0112/Sabang belum maksimal menumbuhkan kebanggaan nasionalisme di tengah himpitan pergeseran sosial politik dan budaya, berkenaan dengan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul “**Pembinaan Teritorial Kodim 0112/Sabang Pasca Perjanjian Helsinki (Studi Pembinaan Komunikasi Sosial Dalam Upaya Peningkatan Nasionalisme Masyarakat)**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan ruang lingkup penelitian maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana dampak perjanjian Helsinki terhadap pembinaan teritorial dalam program TNI Angkatan Darat khususnya yang dilaksanakan Kodim 0112/ Sabang ?
2. Bagaimana kemampuan pembinaan teritorial pasca perjanjian Helsinki Kodim 0112/ Sabang dalam rangka peningkatan nasionalisme?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk memahami dampak perjanjian Helsinki terhadap pembinaan teritorial dalam program TNI Angkatan Darat khususnya yang dilaksanakan Kodim 0112/ Sabang ?
2. Untuk memahami kemampuan pembinaan teritorial pasca perjanjian Helsinki Kodim 0112/ Sabang dalam rangka peningkatan nasionalisme?

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Pengaruh Perjanjian Helsinki Terhadap Nasionalisme Kebangsaan Republik Indonesia.
2. Bagi TNI Angkatan Darat, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan pembinaan wilayah pertahanan darat
3. Bagi akademik, sebagai salah satu bahan kegiatan akademik.

1.5. Batasan Penelitian

Kompleksitas permasalahan khususnya berkenaan dengan pembinaan wilayah pertahanan darat, khususnya untuk wilayah Nangroe Aceh Darussalam, pasca Helsinki, maka kiranya tesis ini dibatasi pada :

1. Wilayah penelitian pada wilayah teritorial Kodim 0112/ Sabang tahun 2007-2009
2. Fokus penelitian pada kegiatan meliputi kualitas dan kuantitas aspek pembinaan wilayah pertahanan darat

1.6. Model Operasional Penelitian

Bila melihat dinamika semakin tingginya kepentingan asing atas Sabang sebagai Zona SLOC (*Sea Lines of Communication*)¹, maka jelas menjadi masalah nasional Indonesia, sebagaimana teori kepentingan nasional menurut *Donald E. Neucherlein* terdiri dari (a) *Defence Interest*, kepentingan negara untuk melindungi negara dan penduduk dari ancaman kekerasan fisik negara lain, dan atau perlindungan sistem politik nasional dari ancaman luar. (b) *Economic Interest*, kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kepentingan ekonomi negara dalam hubungan dengan negara lain. (c) *World Order Interest*, memelihara politik Internasional dan sistem ekonomi sehingga negara merasa aman serta penduduk dan perdagangan dapat beroperasi damai di luar negara. (d) *Ideological Interest* : Kepentingan untuk melindungi dan memajukan atau mempromosikan nilai-nilai sehingga penduduk suatu negara mengambil bagian dan percaya menjadi kebaikan yang universal, (Rosenau 1979:4)

Bila melihat penjelasan di atas maka hakikat kepentingan nasional, menurut Frankel, sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa, sehingga kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara, dan kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional yang dapat dilihat dalam aplikasinya pada kebijaksanaan yang aktual serta rencana-rencana yang dituju (Kusumohamidjojo 1997:35) Dalam praktek aktualnya kepentingan nasional tidak hanya dibuat oleh seorang negarawan yang menganut teori Hegel yang menyatakan bahwa negara adalah kebaikan yang tertinggi yang menjadi dasar totaliterisme), tetapi juga bisa dibuat oleh negarawan lain yang percaya bahwa negara semata-mata hanya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan warga

¹ Zona SLOC adalah Jalur Perdagangan Internasional yang menghubungkan samudara Hindia dengan Selat Malaka, sebagai jalur perdagangan internasional tersibuk.

negaranya. Kedua-duanya bisa saja membuat penafsiran yang sama mengenai kepentingan nasional, sepanjang negara abenar-benar bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan sosial warga negaranya. (Kusumohamidjojo 1997:37)

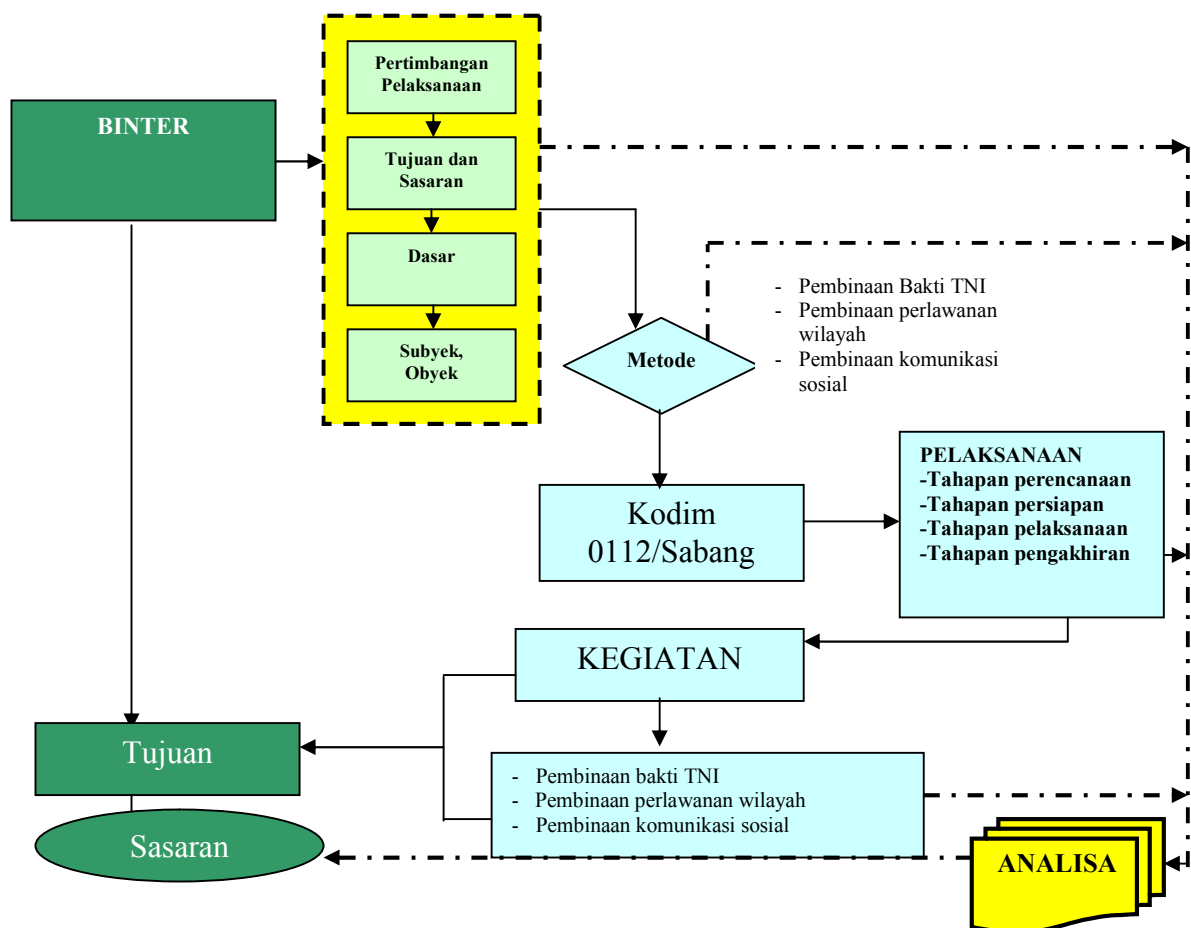
Berdasarkan permasalahan potensi dan letak strategis kota Sabang sebagai Zona SLOC sebagai satu kekuatan bagi kesempatan (*oportunity*) dan sekaligus tantangan (*challenge*) maka hakikat pemeliharaan, menjaga dan melindungi keutuhan Sabang sebagai bentuk idologi menjadi bagian yang sangat penting.

Bangsa ini memiliki dua pengalaman yang akan dicatat dalam sejarah kegagalan yaitu lepasnya pulau Sipadan, Lagiatan dan Timur Leste merupakan satu bentuk kesalahan seluruh komponen bangsa. Perjanjian Helsinki telah diberlakukan dengan spirit baru Aceh, keseriusan rakyat untuk memuliakan Aceh sangat jelas dengan di berlakukannya otonomi khusus (Otsus) dan memberikan keluluasaan bagi Provinsi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam, walau pada sisi implementasi masih banyak menuai pertentangan (Kompas,10/15/2008). Kehadiran Partai Aceh (PA) sebagai pengejawantahan kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat Aceh telah sangat jelas di pergunakan bagi komponen separatis (GAM), simbol-simbol perlawanan dalam peradaban lebih modern sangat jelas, bila di baca dari simbol Kemenangan Partai Aceh (PA) adalah pintu awal kemerdekaan, dan PA bukan hanya partai politik namun sebagai arah perjuangan menuju kemerdekaan serta kekuatan-kekuatan propokatif yang terus di kembangkan oleh komponen GAM (gerakan Aceh Merdeka) dalam bingkai baru Partai Aceh.

Perjanjian Helsinki, pemberian Otsus dan kemenangan partai lokal merupakan manifestasi kemenangan menurut versi individu-individu yang menghendaki Aceh lepas dari NKRI, kondisi ini diperjelas dengan semakin berkurangnya baik kualitatif maupun kuantitatif pembinaan wilayah yang dilakukan oleh kodim, mengingat tekanan dan propaganda masih terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (eks GAM), masih beredarnya senjata organik dan nonorganik di tangan eks GAM menjadi permasalahan, bagi pencapaian pembinaan wilayah pertahanan, mengakibatkan mulai tumbunya *romantisme*

sejarah, serta isu-isu yang kurang bertanggung jawab memberikan dampak terhadap resistensi nasionalisme, gejala ini sudah mulai tampak dengan rendahnya partisipasi PNS dalam upacara bendera, partisipasi masyarakat dalam mengibarkan bendera merah putih menjelang 17 Agustus dan indikator-indikator lainnya.

Melalui kegiatan Bakti TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan khususnya tindakan nyata, merupakan langkah pemersatu masyarakat dengan TNI dimana keduanya diikat dalam NKRI berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mencoba menggambarkan siklus permasalahan ke dalam skema pola pikir sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Melalui komunikasi orang dapat mempengaruhi dan merubah sikap orang lain. Komunikasi memungkinkan perpindahan, penyebaran ide atau penemuan baru kepada orang lain dalam proses pembentukan imege dan persepsi, dengan demikian Binter yang dilakukan Kodim 0112/Sabang harus dapat memanfaatkan komunikasi dengan mengembangkan ide-ide yang positif sebagai cermin paradigma baru TNI.

Masyarakat secara heterogen pada dasarnya tidak terlepas dan selalu berada pada lingkaran-lingkaran pengaruh berbagai aspek kemasyarakatan dan kelembagaan baik itu secara formal maupun informal, maka dalam upaya merubah opini masyarakat sebagai sasaran komunikasi dan informasi. Kegiatan Hubungan Masyarakat melalui Binter oleh Kodim 0112/ Sabang diharapkan mampu menyentuh dan dapat menstimulir pendapat dan pandangan masyarakat berkenaan dengan program sosialisasi Bakti TNI .

Menurut *Ernest Renan*, nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara sedangkan *Otto Bauer*, nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Menurut *Hans Kohn*, nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya kesadaran nasional. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Menurut *L. Stoddard*: Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa, sedangkan menurut *Dr. Hertz* dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics* mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu ; (a) Hasrat untuk mencapai kesatuan, (b) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. (c) Hasrat untuk mencapai keadilan, (d) Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Dari definisi itu nampak bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama, teroganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat atau

suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah; dan hukum (Hamalik 1995:55)

Tripologi perjuangan yang diformulasikan Soekarno dalam rangka menyuburkan paham nasionalisme dalam hati sanubari rakyat Indonesia diterapkannya dengan cara (1) Menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka memiliki hari dulu yang indah. (2) Menambah keinsyafan rakyat Indonesia bahwa mereka memiliki hari atau masa kini yang suram dan gelap. (3). Memperlihatkan kepada rakyat Indonesia sinarnya hari yang akan datang yang berseri-seri, dan terangnya cuaca serta bagaimana caranya mendatangkan masa depan yang penuh dengan janji-janji. Dengan adanya teripologi yang diciptakan Soekarno tersebut maka dalam tataran praksisnya beliau menyusun pergerakan rakyat melalui beberapa cara (a) Membangkitkan kesadaran rakyat bahwa keadaan hidup rakyat tidak adil. (b). Membangkitkan kemauan rakyat supaya mau memperbaiki nasib yang tidak adi itu menjadi adil. (c) Melatih rakyat supaya merasa mampu mengadakan perjuangan memperbaiki nasib tersebut. (Notosusanto 1984:9) Dengan mengacu tripologi nasionalisme yang telah di bangun pendiri Negara (Soekarno) maka sudah sewajarnya nasioanlisme terus di pupuk melalui gerakan-gerakan sebagaimana tripologi diatas, baik secara langsung serta mempotensikan media komunikasi.

TNI disamping sebagai kekuatan pertahanan, juga memiliki tugas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan melalui Pembinaan Bakti TNI, Pembinaan perlawanan wilayah dan Pembinaan komunikasi sosial hal ini telah dilakukan oleh Kodim 0112/ Sabang. Dengan kegiatan tersebut TNI juga memiliki tugas tambahan yang tidak kalah beratnya yakni tugas dalam pemberian informasi secara terbuka melalui kegiatan-kegiatan komunikasi masyarakat. Namun demikian, yang perlu dikaji disini adalah bagaimana program Binter TNI AD dapat dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan komponen bangsa lainnya. Sehingga, Pembinaan Teritorial tidak lagi hanya dianggap 'milik TNI AD' ataupun 'urusan TNI AD', tetapi lebih jauh lagi Binter menjadi 'tanggung jawab dan kebutuhan bersama' seluruh komponen bangsa, baik TNI AD, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, LSM dan lain sebagainya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perubahan Organisasi dan Reposisi TNI

2.1.1. Perubahan Organisasi

Perubahan lingkungan organisasi–eksternal maupun internal adalah suatu keniscayaan, dahulu maupun sekarang. Namun di masa sekarang, kecepatan dan intensitas perubahan lingkungan tersebut pada umumnya berlangsung begitu tinggi, penuh dinamika dan turbulensi. Bahkan, seringkali bersifat diskontinyu sehingga bukan saja menyulitkan, tetapi dapat mengancam keberlangsungan hidup suatu organisasi. Jelaslah, perubahan lingkungan (*environmental change*) akan mengakibatkan tekanan pada organisasi untuk melakukan perubahan organisasional (*organizational change*). Di tengah kuatnya arus perubahan lingkungan, tanpa perubahan diri secara tepat dan signifikan organisasi tersebut niscaya akan terseok, bahkan akan mati terlindas hukum besi perubahan.

George dan Jones (2002;637) menyebutkan sejumlah faktor lingkungan eksternal yang mendorong perubahan, yakni kekuatan kompetisi, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan globalisasi, kekuatan sosial-demografik, dan kekuatan etikal. Dewasa ini persaingan dalam dunia bisnis berlangsung semakin sengit. Dinamika ekonomi dan politik nasional, regional maupun global bergerak sangat fluktuatif dan penuh kejutan. Globalisasi ekonomi dan budaya yang dipicu oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan transportasi telah menyebabkan dunia ini bagaikan desa global (*global village*). Perubahan struktur demografik dan sosial berlangsung secara sangat signifikan. Dan di tengah semua itu mencuat pula di sana-sini kesadaran etik masyarakat yang menuntut ditegakkannya perilaku etis dalam dunia kerja, bisnis, dan politik.

Sementara, pada lingkungan internal organisasi, perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai, etos kerja, kompetensi maupun aspirasi karyawan juga mengharuskan respons organisasional yang tepat. Makin tingginya tingkat pendidikan rata-rata karyawan, misalnya, akan menyebabkan meningkatnya aspirasi dan tuntutan mereka dalam bekerja. Mereka pada umumnya mengharapkan perlakuan kerja yang lebih manusiawi, peluang aktualisasi diri yang lebih besar, suasana kerja yang lebih menyenangkan, cara kerja yang lebih fleksibel, pemberian reward yang lebih adil dan lebih motivatif, kesempatan karir yang lebih terbuka, dan sebagainya.

1. Hambatan-hambatan Perubahan

Namun, perubahan organisasional bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ada banyak kendala yang bisa menghadang dan memacetkan program-program perubahan. Sejumlah kendala yang ditengarai oleh George dan Jones (2002:645-646) adalah:

- a. Kendala-kendala sistem keorganisasian dan kekuasaan,
- b. Perbedaan-perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi yang mekanistik,
- c. Kelembaman (inertia) kultur organisasi,
- d. Norma dan kohesivitas kelompok,
- e. Pemikiran kelompok (group think) dan kendala-kendala individual, seperti ketidaksiapan yang mengakibatkan rasa ketidakpastian, kekhawatiran, ketidakamanan, persepsi selektif, dan retensi kebiasaan.

Mekanisme yang telah tertanam untuk menghasilkan kemantapan dalam beroperasinya suatu organisasi yang diberlakukan dalam sistem seleksi karyawan, sistem pelatihan, sistem penilaian kinerja, sistem reward dan punishment, sistem informasi, sistem keuangan, sistem pengambilan keputusan, dan lain-lain akan menghasilkan suatu inertia ketika menghadapi perubahan.

Orientasi fungsional yang berbeda pada tiap-tiap departemen atau bagian organisasi juga dapat mempersulit terbangunnya kesamaan visi perubahan. Sebagai contoh, departemen keuangan yang lebih

berorientasi pada efisiensi biaya mungkin akan menolak ide perubahan teknologi yang diusulkan departemen produksi yang ingin mengejar kuantitas dan kualitas produksi yang lebih tinggi yang akan berakibat pada meroketnya anggaran. Budaya organisasi, sebagaimana disebutkan hampir 60 tahun yang lalu oleh Selznick (1999;69), merupakan variabel independen yang sangat memengaruhi perilaku karyawan. Nilai-nilai yang sudah terlembagakan melalui praktik perilaku organisasional dalam kurun waktu yang cukup lama akan menjadi panduan otomatis perilaku para karyawan. Organisasi yang memiliki budaya yang kuat, yakni yang ditandai dengan dipegang dan dianutnya nilai-nilai inti organisasi secara intensif dan secara luas oleh anggota organisasi tersebut (Wiener, 2002;142), akan menyulitkan suatu perubahan organisasional yang menuntut berubahnya nilai-nilai inti tersebut. Dengan demikian, suatu organisasi yang sudah berpuluh-tahun mempraktikkan nilai-nilai budaya korup, etos kerja medioker atau bahkan minimalis, dan business ethics yang rendah sudah barangtentu tidak mudah untuk berubah menjadi organisasi yang berbudaya etis, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, beretoskerja tinggi, dan berorientasi pada keunggulan.

Kelompok-kelompok kerja, formal maupun non-formal juga dapat menjadi penghalang upaya perubahan. Individu-individu yang ingin mengubah perilaku kerjanya besar kemungkinan akan dihambat oleh norma kelompok yang tidak sejalan. Tekanan kelompok dapat mengerem usaha-usaha individual maupun program perubahan organisasional. Kelompok-kelompok dengan kohesivitas tinggi yang merasa terancam akan kehilangan kenyamanannya atas penguasaan suatu sumber daya organisasi mungkin akan melakukan perlawanan.

Akhirnya, hambatan perubahan juga sering muncul dari keengganan individual yang berasal dari faktor kebiasaan, ketidaksiapan, terusiknya rasa aman, kekhawatiran akan berkurangnya penghasilan dan bertambahnya kerepotan, ketakutan terhadap hal-hal

yang belum dikenali, dan persepsi negatif yang berasal dari informasi mengenai kegagalan-kegagalan upaya perubahan.

2. Bidang Sasaran Perubahan

Pada dasarnya ada empat bidang organisasional yang bisa menjadi sasaran perubahan, yaitu struktur organisasi, teknologi, setting fisik, dan sumber daya manusia (Robertson et. al., 2000;277).

Hal-hal yang bersifat struktural seperti pembagian kerja, sistem-sistem operasi, rentang kendali, dan desain organisasi jika dirasa sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dapat diubah. Dapat dipertimbangkan perlunya dilakukan perubahan uraian pekerjaan (job description), pengayaan pekerjaan (job enrichment), pelenturan jam kerja, dan penerapan sistem imbalan yang lebih berbasis kinerja atau profit sharing.

Mengubah teknologi seringkali diperlukan demi efektivitas kerja karyawan dan peningkatan kinerja organisasi. Perubahan teknologis biasanya meliputi mesin-mesin, peralatan kerja, metode kerja, dan yang paling mencolok dewasa ini adalah otomatisasi atau komputerisasi. Otomatisasi menggantikan orang dengan mesin yang dapat bekerja lebih cepat, lebih akurat dan lebih murah. Sistem informasi yang canggih memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi secara menakjubkan.

Mengenai perubahan setting fisik, bukti empirik menunjukkan bahwa memang tidak sertamerta hal itu berdampak besar pada kinerja individu maupun organisasi (Steele, 1998;116). Meskipun demikian, setting fisik tertentu terbukti dapat membantu atau merintangikan karyawan-karyawan tertentu dalam berkinerja, sehingga dengan mengubahnya secara tepat kinerja karyawan dan organisasi dapat ditingkatkan (Porras dan Robertson, 2000;279). Tata letak ruang kerja dan peralatan serta desain interior yang dirancang dengan baik akan membantu membangun suasana dan keefektifan kerja. Karyawan akan mudah saling berkomunikasi dalam ruang kantor dengan desain

terbuka, tanpa sekat-sekat dan dinding. Kenyamanan untuk produktivitas kerja juga dipengaruhi oleh intensitas pencahayaan, suhu ruangan, kebisingan, kebersihan, dekorasi maupun warna dinding.

2.1.2. Paradigma Baru TNI

Bentuk nyata dari reposisi peran TNI adalah Paradigma Baru TNI yang dilandasi cara berfikir yang bersifat analitik dan prospektif ke masa depan berdasarkan pendekatan komprehensif yang memandang TNI sebagai bagian dari sistim nasional. Pergeseran paradigma ini merupakan tinjauan atas tatanan lama yang sudah tidak relevan lagi dalam menghadapi tantangan di masa depan. Paradigma Lama sering berorientasi kepada pendekatan keamanan yang mendorong terbangunnya persepsi diri ABRI yang menempatkan dalam posisi sentral dan menjadi penjuror atas keputusan yang menyangkut kehidupan bernegara dan berbangsa. Hal ini yang menyebabkan ABRI merasa harus mengambil tanggung jawab penuh terhadap semua aspek kehidupan bangsa. (Mabes TNI, 1998).

Paradigma Baru TNI lahir bersesuaian dengan visi bahwa TNI akan tetap merupakan kekuatan pertahanan-keamanan yang profesional, efektif, efisien dan modern serta senantiasa siap untuk mengamankan dan memberikan sumbangan Dharma Bhakti yang diperlukan bagi kelancaran pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional bersama-sama dengan komponen strategis bangsa lainnya. Paradigma Baru TNI pada prinsipnya berintikan sebagai berikut (TNI Abad XXI, 1998):

1. Merubah posisi dan metoda tidak selalu harus kedepan. Dalam hal ini militer tidak selalu harus mengambil *leading role*, menjadi dinamisator dan stabilisator melainkan memberi kesempatan kepada lembaga fungsional dalam kehidupan bernegara.
2. Merubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi. Dalam hal ini peran militer dalam jabatan sipil tidak lagi menempatkan personelnya, melainkan mempengaruhi dengan memberi sumbangan pemikiran yang konstruktif.
3. Merubah dari cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung. Peran sosial politik ABRI dalam politik praktis dirubah menjadi penyampaian sumbangan pikiran dan konsepsi kebangsaan kepada instansi fungsional.

4. Bersedia melakukan *role sharing*, kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan dengan komponen bangsa lainnya, sesuai dengan peran masing-masing institusi secara fungsional.

Paradigma Baru TNI ini merupakan suatu rumusan dari reformasi internal yang telah mendapat legitimasi konstitusional dalam Sidang Tahunan MPR 2000 melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Esensi implementasi reformasi internal TNI adalah bertekad meninggalkan politik praktis dan berkonsentrasi pada tugas pokok pertahanan negara, sedangkan pemeliharaan keamanan negara merupakan fungsi POLRI dan pelibatan TNI dalam bantuan kemanan dilaksanakan melalui prosedur permintaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Implementasi Paradigma Baru TNI, 2001).

Resposisi TNI dibagi atas Perubahan Social (*social change*), Kebiasaan (*Behavior*) nilai yang diinginkan dan sikap, dimana :

1. Perubahan Sosial

Perubahan dalam organisasi senantiasa menghadapi masalah apabila perubahan itu dilakukan. Persepsi itulah yang menjadi kerangka acuan utama. Bentuk perubahan organisasi dapat berupa persepsi bahwa organisasi berada pada kondisi ketidakseimbangan atau memerlukan perbaikan. Terdapat tujuh akibat ketidak seimbangan dalam organisasi antara lain :

- a. Pertumbuhan pasar yang dialami organisasi
- b. Kemunduran dalam berbagai kegiatan organisasi
- c. Perubahan dalam bentuk jenis dan intensitas persaingan
- d. Perubahan karena perkembangan dan penerapan teknologi baru
- e. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah
- f. Perubahan sosial di masyarakat
- g. Perubahan politik negara dimana organisasi bergerak (Chrisnadi 2003:67)

Pandangan tentang perlunya perubahan harus mengejawantah dalam kebutuhan yang benar-benar dirasakan karena hanya dalam kondisi demikianlah para anggota organisasi dapat diyakinkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi, diperlukan cara kerja baru, metode kerja baru, inovasi dan bahkan mungkin strategi dan visi yang baru

Penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor yang digunakan para manajer yang berhasil melakukan perubahan organisasi, yaitu :

- a) Kesempatan dan pemanfaatan informasi
Organisasi yang memperbaharui dirinya menentukan arah yang akan ditempuh dimasa depan, tanpa terlibat dalam perumusan strategi secara rinci. Organisasi yang memperbaharui dirinya memerlukan informasi sebagai keunggulan strategiknya dan fleksibilitas sebagai senjata pemungkasnya.
- b) Penentuan arah dan pemberdayaan sumber daya manusia
Organisasi yang memperbaharui dirinya memerlukan semua anggota organisasi sebagai sumber insan yang matang dan bertanggung jawab, pengendalian tidak dilakukan secara ketat sebab organisasi komit untuk meraih hasil yang diharapkan bersama.
- c) Fakta yang bersahabat
Para pimpinan memerlukan fakta sebagai teman karena informasi dan fakta meningkatkan kemampuan mereka mengambil keputusan secara efektif.
- d) Cermin yang berbeda
Pimpinan yang berhasil memperbaharui organisasi yang dipimpinnya ternyata adalah pimpinan yang mau mendengar semua pihak yang hasilnya dimanfaatkan untuk mengantisipasi timbulnya krisis. Artinya ia bersedia menggunakan cermin lain disamping cermin manajerialnya sendiri.
- e) Pengembangan kerja sama tim dan perubahan iklim saling mempercayai
Dengan mengelak keterlibatan dan percaturan kekuasaan dalam organisasi, pimpinan berupaya mengembangkan kerja sama tim dan menumbuhkan serta memelihara iklim saling mempercayai dikalangan para bawahannya.
- f) Stabilitas dan dinamika
Para pembaharu mampu menemukan keseimbangan antara gerakan pembaharuan dan perubahan dengan pemeliharaan stabilitas. Artinya, berhasil diupayakan terjadinya perubahan tanpa berakibat pada kegoncangan organisasi.
- g) Sikap dan perhatian
Dalam organisasi yang mampu berubah, tindakan dan perilaku manajerial yang demokratis menonjol, yang berarti bahwa manajer didalamnya tidak sekedar mampu memberikan perintah.
- h) Organisasi
Organisasi yang dikelola para pembaharu memberikan perhatian besar pada kejelasan misi organisasi dan merinci misi tersebut menjadi bagian kegiatan operasional. Dengan demikian setiap orang mengetahui kontribusi apa yang dapat diberikannya secara maksimal demi keberhasilan organisasi dimana ia berkarya. (2001:211)

2. Nilai yang diinginkan

Perubahan dari nilai yang diinginkan lebih dasari oleh perubahan kultur organisasi (paradigma lama TNI menjadi paradigma TNI yang baru) dimana perubahan lingkungan yang sering terjadi secara besar-besaran dan berlangsung cepat, mempunyai dampak kuat terhadap berbagai segi kehidupan. Fenomena baru timbul, terobosan-terobosan terus terjadi yang pada gilirannya menambah ketidakpastian masa depan yang ciri-cirinya makin sulit dikenali. Bahkan ada ungkapan yang menyatakan bahwa bentuk, jenis dan indentitas perubahan dimasa depan akan membuat perubahan yang terjadi hingga sekarang.

Perubahan-perubahan tersebut, yang menjalankan dalam berbagai bentuk seperti peningkatan kreativitas, inovasi, visi tentang masa depan, pemanfaatan teknologi yang makin canggih, orientasi baru dalam interaksi dengan semua pihak yang berkepeentingan, begitu mendasar sifatnya sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengubah kultur organisasi. Suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang dianut oleh semua pihak yang harus berinteraksi dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan demikian kultur organisasi menumbuhkan persan dalam diri para anggota organisasi tentang berbagai hal seperti perilaku apa yang harus dilakukan, menentukan skala prioritas secara tajam, membantu para anggota organsiasi mengisi kekosongan antara petunjuk formal dan kenyataan operasional yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu kultur organisasi sangat penting dalam mengimplementasikan strategi organisasi.

Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa setiap organisasi menghadapi lingkungan yang sangat dinamik. Jika disuatu pihak dikatakan setiap organisasi perlu memiliki kultur yang kuat, dipihak lain kultur tersbut tidak harus sedemikian dalamnya berakar dalam hati sanubari para angotanya sehingga sulit untuk diubah.

Perubahan secara dramatis, mendasar tersebut pada hakekatnya merupakan implementasi dari konsep restrukturisasi sejalan yang telah

disinggung dimuka. Fokus perilaku organisasi merupakan peningkatan proses perubahan operasional sedemikian rupa sehingga para manajernya dapat cepat mampu melakukan perubahan pada kultur yang timbul. Berkaitan dengan hal tersebut Sondang terdapat 3 (tiga), faktor utama yang harus diperhatikan ialah :

a. Visi Masa Depan

Visi masa depan sesungguhnya menyangkut dua segi, yaitu persepsi para manajer tentang bentuk masa depan dengan lingkungan dengan mana organisasi harus berinteraksi dan visi tentang masa depan organisasi yang diinginkan oleh semua pihak yang bekepentingan, terutama para pimpinan.

b. Rancang Bangun Model Perubahan

Perilaku organisasi akhirnya menyangkut seluruh organisasi, akan tetapi perilaku organisasi biasanya dimulai dalam suatu bagian tertentu, yang pemilihannya sebagai pilot project didasarkan pada kriteria yang jelas dan menyangkut sub kultur tertentu pula.

3. Menghargai perilaku yang mendorong perubahan

Telah dimaklumi bahwa suatu konsep mendasar dalam teori motivasi ialah bahwa manusia cenderung menampilkan perilaku tertentu yang mendatangkan imbalan dan kenikmatan dan mengelak berbuat tindakan yang dapat berakibat pada pengenaan sanksi disiplin . Jika suatu organisasi justru menghargai sikap dan perilaku yang didasarkan pada kultur yang lama, jelas para anggotanya tidak akan terangsang untuk berubah, bahkan akan justru menolak setiap perubahan yang direncanakan oleh pimpinan organisasi. (Goodman 1998:226)

Dengan kata lain jika terjadinya perubahan, manajemen harus bersedia memberikan perangsang tertentu seperti promosi jabatan, kenaikan pangkat istimewa, kenaikan gaji yang dipercepat, piagam penghargaan, plakat dan lain-lain atau bentuk-bentuk lain yang mungkin bukan dalam bentuk benda akan tetapi dipandang memiliki nilai tinggi bagi penerimanya, misalnya meningkatkan gengsi dan statusnya dimata orang lain didalam dan diluar organisasai.

3. Sikap (*attitudes*)

Sikap pada dasarnya merupakan suatu pola tindak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengekspresikan sesuatu yang menjadi suatu keyakinan yang perlu dilakukan, namun sikap itu sendiri dapat mencerminkan hasil yang akan didapat atau akibat yang akan diperoleh. (Rachmat 2008:89) Dampak dari sikap yang terjadi ada yang dapat dilihat secara langsung, tetapi adapun akibat yang diterima memerlukan waktu yang tidak dapat ditentukan. Tetapi secara pasti bahwa sikap itu akan menghasilkan suatu produk yang bersifat abstrak dan nyata, dalam suatu kelompok misalnya apabila seseorang dapat tanggapan dari apa yang dilakukan, maka akan terlihat oleh kita bahwa orang akan menanggapi dengan beberapa reaksi baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Sikap akan berkaitan dengan tugas pekerja dan memungkinkan sebagai bahan evaluasi terhadap seseorang yang diakibatkan pola tindak yang bersifat positif maupun negatif yang dipegang oleh para anggota mengenai aspek-aspek dari lingkungan kerja. Dalam suatu organisasi sikap merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena sikap dapat mempengaruhi perilaku pekerjaan. Sikap adalah evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu obyek atau gagasan

Sikap akan menempatkan seseorang kedalam satu pikiran menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekati atau menjauhi sesuatu tersebut. Informasi yang dimaksudkan kedalam pemikiran seseorang oleh orang lain, misalnya seorang atasan kepada bawahannya, dapat mengubah sikap bawahan atau menggerakkan bawahannya untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Respon yang dilakukan oleh bawahan berupa respon kognitif, afektif, dan perilaku, respon ini sangat erat hubungannya dengan tahap pengambilan keputusan seseorang.

Sikap adalah suatu proses pengorganisasian motivasi, emosi, persepsi dan kognisi yang berlangsung terus menerus dan yang berhubungan dengan

berbagai aspek dari pesan yang diterima seseorang, (Crutchfield 1999:764). Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan bagian atau komponen dari sikap. Untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan persepsi, Krech dan mengatakan, bahwa sikap itu terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen efektif yang perasaan/emosi seseorang terhadap obyek termasuk respon/tanggapan psikologis; komponen kognitif yakni pengertian atau kesadaran terhadap suatu obyek misalnya pengetahuan, fakta, keyakinan, pendapat, dan komponen tingkah laku yaitu mental dan fisik yang menyiapkan seseorang untuk merespons sesuatu obyek dengan cara-cara tertentu. (Crutchfield 1999:764).

Selanjutnya dalam kaitannya dengan pengukuran sikap dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori berdasarkan dimensinya yang berdasarkan suatu penilaian yakni baik dan buruk, berdasarkan dimensi yang mengarah pada potensi yakni kuat dan lemah; berdasarkan dimensi yang mengarah pada suatu kegiatan yakni cepat dan lambat, dimensi berdasarkan kuat atau lemahnya argumentasi yakni tinggi dan rendah; dimensi berdasarkan obyek psikologis yang diamati yakni posisi dan negatif. (Crutchfield 1999:764).

Dari beberapa kajian pustaka di atas, menunjukkan betapa erat pengaruh antara sikap terhadap kinerja atau performance, antara lain sikap seseorang terhadap pekerjaan tidak sama dan respon terhadap rangsangan atau insentif pun tidak akan sama (Goodman.1998:209) Selanjutnya menurut Goodman, sikap berhubungan erat dengan pekerjaan atau suasana kerja yang dapat memberi manfaat bagi kebutuhan seseorang. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap pada dasarnya tidak menetap artinya dapat diubah atau dipengaruhi oleh lingkungan atau karena adanya rangsangan dari luar dirinya sehingga dapat memotivasi seseorang untuk berperilaku tertentu. sikap bukan dibawa dari lahir melainkan diperoleh dari pengalaman, karena itu sikap dapat dipengaruhi atau sebaliknya dapat diubah, (Rachmat, 2000;20)

4. Kebiasaan (*Behavior*)

strategi dari perubahan kebiasaan dari paradigma sebelum dan membentuk atau bergeser pada pradigma baru dalam satu kebiasaan baru merupakan satu bentuk mengubah budaya organisasi memerlukan strategi. Strategi adalah rencana untuk mengembangkan atau perubahan selama beberapa tahun, dan mempertimbangkan antara hubungan fungsi, tujuan dan tanggung jawab dalam tubuh organisasi serta dampak pengaruh eksternal. (Lurance 2001;64)

Menurut pendekatan organisasi sebagai kultur, sebuah organisasi atau perusahaan bukanlah sekedar tempat orang beraktifitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melainkan juga merupakan pandangan hidup (*way of life*) bagi para anggotanya. Menurut teori ini, organisasi adalah tempat dimana sejumlah penampilan komunikasi atau kinerja budaya dapat diamati (Susanto 2000;35)

Budaya sebagai komunikasi atau organisasi sebagai budaya akan nampak dalam kata-kata (*words*), segala sesuatu yang bersifat material, dan perilaku (*behaviors*). Gabungan ketiganya akan mempengaruhi para anggota sehingga terbentuklah budaya organisasi dikalangan mereka. Jadi organisasi sebagai kultur mengisyaratkan bahwa setiap organisasi melalui kinerja komunikasi atau kinerja budayanya berkesempatan membentuk merevisi atau menggantinya dengan yang sama sekali baru budaya organisasi atau perusahaannya. (Edward 2000:35)

Melalui teori ini dapat dipahami pula bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara kinerja komunikasi dan budaya perusahaan. Dengan kinerja komunikasi dapat terbentuk budaya perusahaan. Sementara kuat atau lemahnya budaya perusahaan dapat dipantau dari kinerja komunikasinya atau kinerja budayanya. Dari perspektif ini budaya merupakan suatu yang dinamis, bisa berkembang, karena proses komunikasi untuk memahami kehidupan organisasi (perusahaan) yang terus menerus harus menyesuaikan diri (adaptasi) dengan lingkungannya perspektif ini sangat cocok dalam memahami budaya perusahaan.

2.2. Konflik

Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi dalam hubungan proses produksi yang termanifestasikan dalam pemogokan buruh yang memiliki tuntutan ekonomis berupa kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Pertikaian antar kelompok etnis yang berbeda dalam memperebutkan sumber yang sama juga tidak jarang terjadi dalam masyarakat yang mejemuk. Demikian juga konflik yang memiliki motif keagamaan. Pertentangan antara kelompok keagamaan yang satu dengan kelompok keagamaan yang lain sering kali terjadi, karena masing-masing berusaha mempertahankan kemurnian ajaran yang diyakininya. Sedangkan dalam kehidupan politik masyarakat sering dihadapkan pada konflik dalam rangka untuk mendapatkan dan atau memperjuangkan sumberdaya langka yang tidak jarang disertai dengan kekerasan. Konflik adalah unsur penting bagi integrasi sosial. Selama ini konflik selalu dipandang sebagai faktor negatif yang memecah belah. Konflik sosial dalam beberapa cara memberikan sumbangan pada keutamaan kelompok serta mempererat hubungan interpersonal.

1. Tingkatan konflik

Agar bisa merespon konflik secara tepat, kita perlu memahami level (tingkatan) konflik. Ada konflik yang levelnya individual dan ada pula konflik yang levelnya kelembagaan. Keduanya akan dipaparkan secara lebih detail berikut ini.

a. Konflik Tingkat Individu

Dalam kategori ini, terdapat dua kategori konflik, yaitu: (1) konflik dalam diri individu yang bersangkutan, dan (2) konflik antar individu. Konflik dalam diri seseorang terjadi ketika dia mempunyai dua atau lebih kepentingan yang sifatnya bertentangan. Ketika kepentingan-kepentingan itu sama-sama menarik, atau sama-sama tidak menarik, namun dia harus menentukan pilihan, maka terjadilah konflik dalam diri individu yang

bersangkutan. Konflik antar individu, terjadi ketika dua individu mempunyai kepentingan yang sama terhadap satu hal, dan mereka sama-sama tidak mau mengalah. Bisa juga, konflik terjadi ketika mereka mempunyai perbedaan pandangan atau pendapat, dan masing-masing menganggap pendapatnyalah yang paling benar. Pertentangan-pertentangan semacam inilah yang menimbulkan konflik antar individu.

b. Konflik Tingkat Lembaga

Dua atau lebih lembaga, bisa terlibat dalam suatu konflik. Pada tingkat lembaga ini, ada dua tingkatan konflik: (1) konflik dalam lembaga dan (2) konflik antar lembaga. Konflik dalam lembaga terjadi suasananya hampir sama dengan konflik antar individu sebagaimana disebutkan di atas, tetapi sifatnya lebih kompleks. Yang membedakan adalah banyaknya individu yang terlibat dalam konflik. Anggota-anggota dalam suatu lembaga saling bertentangan karena mempunyai kepentingan yang sama terhadap satu hal dan sama-sama tidak mau mengalah. Mereka mempunyai perbedaan pandangan atau pendapat dan masing-masing menganggap pendapatnyalah yang paling benar. (Baquni 2004;21)

Kalau kita amati dinamika suatu lembaga, kita bisa menemukan adanya dalam tiga tipe konflik. Adapun tipe-tipe konflik ini adalah:

- 1) Konflik penugasan. Dalam kasus ini, konflik terjadi karena perbedaan pendapat dalam hal bagaimana cara menyelesaikan suatu tugas. Sebagai contoh, ada perbedaan pendapat dalam satu kelompok kerja bagaimana cara kampanye yang efektif, apakah melalui radio atau televisi.
- 2) Konflik emosional. Konflik emosional ini melibatkan hubungan interpersonal antar anggota yang bekerja dalam satu kelompok. Dalam hal ini, emosi negatif, perasaan tidak suka terhadap orang lain menjadi hal pendukung konflik.
- 3) Konflik administratif. Konflik ini terjadi manakala terjadi ketidaksetujuan tentang cara merumuskan keputusan kebijakan. Konflik ini meliputi ketidaksepakatan mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki dari anggota kelompok.

Banyak hal yang dapat menjadi penyebab konflik antar lembaga: keterbatasan sumberdaya, perbedaan pandangan, atau tujuan yang tidak

sejalan. Dalam konflik antar lembaga dapat berdampak pada persepsi dan tingkah laku masyarakat. Dalam sebuah lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, setiap anggota memiliki kepentingannya sendiri.

2. Anatomi Konflik

Pada tingkatan apapun konflik yang terjadi, pada dasarnya konflik melibatkan unsur-unsur dasar yang khas. Kemunculannya dipicu oleh suatu kejadian penting. Sejalan dengan acara tersebut di atas, Karen Jehn mengurai anatomi dengan menanyakan, (1) apa yang memicu konflik, (2) siapa saja yang terlibat dalam konflik, (3) apa sih isu yang disengketakan, (4) bagaimana strategi yang dipakai masing-masing pihak yang berkonflik untuk mencapai kemenangan, (5) konflik meluas/mereda, dan (6) apa konsekuensi dari konflik yang terjadi. (Pierce, John 2004;319)

Dalam rangka menganalisis konflik, khususnya untuk keperluan menangani dan mengelolanya, beberapa pertanyaan berikut perlu diperhatikan:

- a) Apa pemicu konflik
Pemicu konflik merupakan kejadian yang menjadi “pembuka” suatu konflik dan menjadikan konflik bersifat terbuka.
- b) Siapa pihak-pihak yang terlibat
Pihak-pihak yang terlibat terdiri dari pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik, pihak yang memberikan dukungan atau konstituen.
- c) Pokok sengketa dan isu konflik
Isu konflik merupakan hal yang menjadi akar masalah dari konflik tersebut, contoh: perebutan tanah, perebutan jabatan.
- d) Apa saja strategi yang digunakan pihak-pihak yang berkonflik
Strategi yang dimaksudkan disini adalah kegiatan, taktik apa saja yang dilakukan pihak yang berkonflik untuk menyerang pihak lainnya. Bisa dengan menggunakan demonstrasi, penyebaran kabar baru, dan lainnya.
- e) Bagaimana konflik meluas sehingga melibatkan lebih banyak pihak, wilayah yang lebih luas, dan isu yang lebih banyak
Dapat terjadi, suatu konflik yang pada awalnya hanya melibatkan dua pihak dan satu isu, bisa berkembang sehingga melibatkan lebih banyak aktor, dan juga bertambah banyak isu yang dipertentangkan.
- f) Apa hasil dan akibat/dampak yang ditimbulkan konflik
Hasil dan akibat yang ditimbulkan bisa bersifat fisik seperti pembakaran rumah, korban tewas, kerusakan lingkungan, maupun akibat yang bersifat non fisik seperti menguatnya stereotip, trauma, pengelompokan, dan lainnya. (Baquni 2002;81)

3. Empat Tahap Resolusi Konflik

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan *problem-solving approach*. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.

a. Tahap I, Mencari De-eskalasi Konflik

Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (*entry point*) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.

Kajian tentang *entry point* ini didominasi oleh pendapat Zartman (1985) tentang kondisi "*hurting stalemate*". Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Pendapat ini didukung oleh Bloomfield, Nupen dan Haris (2000). Namun, *ripeness thesis* ini ditolak oleh Burton (1990, 88-90) yang menyatakan bahwa "*problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable options, that would make this ripening unnecessary*". Dengan demikian, *entry point* juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik (Kriesberg: 1991).

Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa agensi internasional. UNHCR, misalnya, telah menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 1995 yang berjudul “A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian Operations”. Panduan yang sama juga telah dipublikasikan oleh Institute for International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Guide to Peace Support Operations”.

b. Tahap II, Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik (Anderson, 1996). Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *mid-war operations* (Loescher dan Dwoty: 1996; Widjajanto: 2000). Prinsip ini yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi kemanusiaan minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas pokok (*commodity-based humanitarianism*) dianggap tidak lagi memadai. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (*entry*) diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (*political settlement*) antara aktor konflik.

c. Tahap III: Problem-solving Approach

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah *problem-solving* yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi

yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri: 1996, 149). Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton (1990, 202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (*total environment*). Aplikasi empirik dari *problem-solving approach* ini dikembangkan oleh misalnya, Rothman (1992, 30) yang menawarkan empat komponen utama proses problem-solving.

d. **Tahap IV, *Peace-building***

Tahap keempat adalah *peace-building* yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.

Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily (2000, 135-283) yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik. Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu: (1) pemilihan bentuk struktur negara; (2) pelimpahan kedaulatan negara; (3) pembentukan sistem trias-politica; (4) pembentukan sistem pemilihan umum; (5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan (5) pembentukan sistem peradilan. Tahap kedua dari proses *peace-building* adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut

Tahap terakhir dari proses *peace-building* adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah "*Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem*". Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta

mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. (Miall: 2000, 302-344). Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system, Widjajanto: 2001) Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan preventive diplomacy yang oleh Lund (1996, 384-385) didefinisikan sebagai:

“preventive diplomacy, or conflict prevention, consists of governmental or non-governmental actions, policies, and institutions that are taken deliberately to keep particular states or organized groups within them from threatening or using organized violence, armed force, or related forms of coercion such as repression as the means to settle interstate or national political disputes, especially in situations where the existing means cannot peacefully manage the destabilizing effects of economic, social, political, and international change”.

Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik (Widjajanto: 2001). Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan *Non-Governmental Organisations* (NGOs) (Aall:1996), mediator internasional (Zartman dan Touval: 1996), atau institusi keagamaan (Sampson: 1997; Lederach: 1997).

2.3 Pembinaan Teritorial (Binter)

Arti harfiah Pembinaan itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: *“...segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah...”*. Dengan kata lain, suatu pembinaan memerlukan keberadaan pihak yang merencanakan dan mengarahkan. Sementara teritorial memiliki makna harfiah yaitu sebagai suatu wilayah dan semua sumber daya yang ada di dalam dan di atasnya yang diikat dengan batas wilayah berdasarkan hukum nasional dan internasional yang berlaku (Pusterad, ;2003;10). Pembinaan Teritorial TNI AD berdasarkan Buku Petunjuk Induk TNI AD tentang Binter

mempunyai definisi yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat sehingga tercipta kemandirian TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara mata darat. Pertanyaan yang cukup menggelitik adalah mengenai siapa berperan sebagai 'Pembina dan yang dibina' dalam Binter TNI AD. Dalam pengertian di lingkungan TNI AD, yang dibina disini adalah aspek demografi, geografi dan kondisi sosial agar menjadi suatu Ruang Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk-mendukung kepentingan pertahanan negara mata darat. Namun, pada masa sekarang muncul pemikiran di sebagian kalangan masyarakat tentang siapa sebenarnya yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai Pembina Teritorial - Pemerintah atau TNI AD? berdasarkan pengertian di atas, maka secara implisit dijelaskan bahwa penyiapan sumber daya nasional guna mendukung pertahanan negara yang bersifat semesta merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pertahanan yang melaksanakan Pembinaan Potensi Nasional (Binpotnas). Bagaimana dengan Binter itu sendiri? Banyak kalangan yang rancu dalam memahami Binter maupun Binpotnas. Binpotnas pada intinya adalah pembinaan potensi sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan negara. Sasarannya adalah terwujudnya kekuatan pertahanan yang terdiri dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Binpotnas menjadi tugas Depan yang pelaksanaannya dibantu oleh TNI (bagian dari tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang) sesuai mata yaitu TNI AD melaksanakan Binpotwil, TNI AL melaksanakan Binpotmar, TNI AU melaksanakan Binpotdirga.

Dengan demikian jelas bahwa peran TNI AD dalam Pembinaan Teritorial adalah melakukan penyiapan aspek Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial agar terwujud suatu Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh sehingga dapat diberdayakan untuk mendukung tugas-tugas TNI AD dalam melaksanakan OMP dan OMSP. Selanjutnya TNI AD memberikan tugas pokok Pembinaan Teritorial kepada Komando Kewilayahan TNI AD yaitu Kodam, Korem, Kodim sampai dengan Koramil. Adapun metode yang digunakan oleh Komando

Kewilayahan TNI AD dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial yaitu Bintahwil, Komsos dan Bhakti TNI

2.3.1. Konsep *Partnership* dalam Pembinaan Teritorial.

Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan oleh TNI AD selama ini telah menimbulkan kekeliruan pemahaman secara kultural di sebagian aparat teritorial di daerah. Kekeliruan tersebut antara lain adalah timbulnya profilisasi 'Pembina Teritorial' yang sering diterjemahkan juga sebagai 'Penguasa wilayah'. Mentalitas seperti inilah yang menyebabkan Komunikasi Sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh aparat teritorial di wilayah tidak berjalan secara efektif. Dikotomi 'Pembina dan yang dibina' akan mengakibatkan konotasi 'Penguasa dan yang dikuasai', dan hal ini jelas mengekspresikan strata kedudukan dalam status sosial yang tidak sejajar. Padahal, Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode dalam Pembinaan Teritorial memiliki esensi yang sangat fundamental jika dilihat dari definisinya yaitu :

- a. *Komunikasi Sosial sebagai metode* adalah suatu cara yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD yang berhubungan dengan perencanaan dan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan keeratn hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan.
- b. *Komunikasi Sosial sebagai kemampuan* adalah kemampuan prajurit TNI AD dalam berkomunikasi dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait lainnya guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan. (Pusterad, ;2003;10).

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa 'terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan' merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan harus dibangun guna menciptakan aspek Geografi menjadi Ruang Juang, Demografi menjadi Alat Juang, serta Kondisi Sosial yang meliputi bidang *panca gatra* (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam) menjadi Kondisi Juang yang tangguh dalam konteks penyiapan sumber daya nasional untuk mendukung Sistem Pertahanan Semesta (SISHANTA).

Saling pengertian dan kebersamaan tersebut memerlukan adanya kesetaraan dan kerjasama yang solid dalam menyusun dan melaksanakan program Pembinaan Teritorial antara Komando Kewilayahan TNI AD dengan Pemerintah Daerah, LSM, tokoh-tokoh politik, agama dan masyarakat, serta komponen bangsa lainnya. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan hubungan antar individu maupun kelompok yang tidak bisa dibatasi oleh struktur organisasi yang cenderung berbentuk Piramida-yang lebih mencerminkan hubungan atasan dan bawahan.

Bagaimanapun juga, gambaran tersebut bukanlah suatu contoh terbaik yang harus dilakukan oleh TNI AD mengingat kondisi sosial, kemampuan anggaran, kultur dan pola pikir bangsa dan negara Indonesia yang tentunya berbeda dengan Amerika Serikat. Namun demikian, yang perlu dikaji disini adalah bagaimana program Binter TNI AD dapat dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan komponen bangsa lainnya. Sehingga, Pembinaan Teritorial tidak lagi hanya dianggap 'milik TNI AD' ataupun 'urusan TNI AD', tetapi lebih jauh lagi Binter menjadi 'tanggung jawab dan kebutuhan bersama' seluruh komponen bangsa, baik TNI AD, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, LSM dan lain sebagainya.

Apabila konsep tersebut dapat dikembangkan di masa mendatang, TNI AD tetap tidak akan kehilangan peran sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial. Hal ini perlu dicermati, karena muara dari pelaksanaan Binter tersebut adalah terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan matra darat. Dengan kata lain, konsep-konsep dalam program Pembinaan Teritorial (Binter) tetap tidak dapat dilepas dari TNI AD, karena TNI AD-lah yang paling menguasai tentang bagaimana harus menyiapkan kepentingan pertahanan matra darat pada tataran operasional dan taktis. Namun, pendekatan yang dilakukan pada masa mendatang tidak lagi harus mengambil posisi '*take a lead''ing ngarsa sung tulada - ing madya mangun karsa - tut wuri handayani'*. Satu hal yang juga patut dicermati secara cerdas dan bijaksana adalah dasar legalitas dalam menerapkan konsep kemitraan (*partnership*) tersebut. Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa

Pemerintah Daerah semestinya juga memiliki peran tertentu dalam Pembinaan Teritorial dalam hal ini penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan termasuk mengalokasikan anggaran melalui APBD. Namun, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan terinci tentang batas kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten di bidang Pembinaan Teritorial tersebut yaitu penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan, agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan tanggung jawab masing-masing. (Soedarsono 2008;16)

Pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh aparat teritorial disetiap Komando Kewilayahan ditingkat Kodim secara umum telah berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, namun dihadapkan kepada tuntutan untuk mampu mewujudkan stabilitas keamanan wilayah seiring dengan perkembangan situasi pada lingkungan strategis saat ini dan mengemukanya berbagai permasalahan konflik diberbagai wilayah nasional yang telah menjurus kepada disintegrasi bangsa, maka hasil pembinaan yang telah dilaksanakan belum mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, indikasi yang terlihat adalah masih terjadinya beberapa konflik dalam masyarakat yang belum mampu diatasi secara tuntas oleh keberadaan aparat teritorial, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kurang profesionalnya aparat teritorial dan kurang tepatnya penerapan manajemen teritorial dihadapkan dengan sasaran pembinaan.

2.3.2. Tinjauan Profesionalitas Aparat Teritorial.

a. Sikap dan Perilaku Aparat Teritorial

Pembinaan teritorial yang lahir ditengah-tengah perjuangan bangsa bertujuan menciptakan semangat persatuan dan kesatuan khususnya antara TNI dengan Rakyat. Semangat inilah yang merupakan tuntutan terhadap aparat teritorial Kodim agar senantiasa memiliki sikap dan perilaku prajurit yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Sikap dan perilaku yang tercermin dari para aparat teritorial saat ini pada umumnya sudah baik, namun demikian masih terdapat sikap dan perilaku aparat teritorial dilapangan yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai prajurit rakyat, sehingga

menimbulkan image negatif oleh masyarakat terhadap keberadaan TNI ditengah masyarakat.

b. **Kemampuan Aparat Teritorial.**

- 1) Kemampuan Deteksi dini, Lapor cepat dan Cegah dini. Kemampuan deteksi dini, lapor cepat dan cegah dini yang seharusnya mutlak dimiliki secara optimal oleh setiap aparat teritorial yang berada diwilayah, dinilai masih jauh dari yang diharapkan, hal ini terlihat dari sering terdadaknya aparat teritorial dengan munculnya beberapa konflik yang terjadi tanpa mampu diantisipasi jauh sebelum terjadinya konflik, kondisi ini mengindikasikan bahwa para aparat teritorial belum memiliki kemampuan dalam mempelajari sumber dan anatomi konflik yang mungkin timbul diwilayah tanggung
- 2) Kemampuan penerapan Manajemen Teritorial. Kemampuan penerapan manajemen teritorial oleh Kowil khususnya di tingkat Kodim dirasakan kurang berorientasi kepada tren perkembangan situasi yang terjadi, manajemen yang dilakukan oleh aparat teritorial saat ini masih berorientasi pada pembinaan rutin sesuai program, hal ini masih minimnya pemahaman unsur pimpinan terhadap manajemen konflik dan manajemen modern, akibatnya pembinaan teritorial yang dilakukan masih kurang mampu menjawab prioritas tantangan tugas yang harus di selesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3) Kemampuan Penguasaan Wilayah. Kemampuan penguasaan wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya mutlak bagi setiap aparat teritorial agar mampu mengklasifikasikan wilayah tanggung jawabnya tersebut sesuai dengan hakekat ancaman yang akan dan mungkin timbul, serta mampu mengidentifikasi penduduk diwilayahnya yang mungkin dicurigai dapat menjadi provokator dan belum mampu menguasai wilayah tanggung jawabnya secara utuh dan prospektif.
- 4) Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat. Kemampuan penyiapan tenaga perlawanan rakyat untuk membantu TNI dalam meredam konflik yang terjadi di daerah, hingga saat ini belum terwujud secara optimal oleh para aparat teritorial yang berada diwilayah, kekuatan minimal tenaga rakyat terlatih yang harus disiapkan oleh Komando Kewilayahan hampir tidak dapat terpenuhi, kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa aparat teritorial belum mampu menguasai wilayah tanggung jawabnya secara utuh untuk melaksanakan pembinaan perlawanan rakyat.
- 5) Kemampuan Komunikasi Sosial. Unsur pokok dalam komunikasi sosial yang terjadi saat ini adalah aparat teritorial diwilayah khususnya Kodim, belum mampu menterjemahkan dan melakukan interaksi dalam berkomunikasi dengan masyarakat,

yang berakibat banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pertahanan negara, sehingga berakibat kepada langkah dan tindakan TNI tidak direspon positif oleh masyarakat.

b. Sarana dan prasarana.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan, kesiapan sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas para aparat teritorial di lapangan. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan Komando Kewilayahan di tingkat Kodim khususnya piranti lunak, sarana transportasi dan sarana komunikasi belum dapat memenuhi tuntutan tugas dilapangan, sehingga kecepatan dan ketepatan dalam menangani setiap permasalahan yang timbul tidak dapat diatasi dengan cepat dan tepat sasaran.

2.3.3 Penerapan metoda pembinaan teritorial.

Penerapan metoda pembinaan teritorial yang dilakukan oleh para aparat teritorial di wilayah saat ini dinilai belum tepat dan terarah kepada tujuan dan sasaran yang diinginkan, hal ini diakibatkan oleh masih kurang optimalnya tingkat kemampuan aparat teritorial dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan situasi serta perubahan hakekat ancaman yang dinamis, sehingga penerapan metoda yang dilakukan oleh aparat teritorial kurang berorientasi kepada kemungkinan prioritas sasaran pembinaan. Akibat dari pembinaan yang dilakukan kurang terarah pada sasaran yang diharapkan, maka upaya menciptakan stabilitas keamanan di wilayah tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak berorientasi kepada kemungkinan hakekat ancaman.

Untuk mencapai hasil yang optimal perlu menggunakan metode pembinaan bhakti TNI, pembinaan perlawanan wilayah dan pembinaan komunikasi sosial dengan rincian :

a) Bhakti TNI

Merupakan cara untuk menangani masalah-masalah sosial kemanusiaan untuk menyiapkan sarana dan prasarana pertahanan wilayah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atas permintaan instansi terkait dan atau instansi sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan

- b) Pembinaan perlawanan wilayah
Merupakan cara untuk mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah, dengan mengajak untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya menangkal setiap potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah.
- c) Komunikasi social
Untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyiapan potensi wilayah untuk kepentingan pertahanan. Diselenggarakan untuk memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa. Dengan demikian akan terwujud saling pengertian dan kebersamaan dengan harapan agar masyarakat dapat berpartisipasi dibidang pertahanan. Upaya tersebut melalui hubungan pribadi, hubungan langsung dan tidak langsung, hubungan timbal balik dan pengembangan sikap keterbukaan untuk menerima koreksi.

2.4. Komunikasi Sosial

2.4.1. Komunikasi Massa

Wilbur Schramm menyatakan, komunikasi massa berfungsi sebagai *decoder*, *interpreter* dan *encoder*. Komunikasi massa *men-decode* lingkungan serta untuk mengawasi kemungkinan timbulnya bahaya, mengawasi terjadinya persetujuan dan juga efek-efek dari hiburan. Komunikasi massa menginterpretasikan hal-hal yang di-*decode* sehingga dapat mengambil kebijakan terhadap efek, menjaga berlangsungnya interaksi serta membantu anggota-anggota masyarakat menikmati kehidupan. Komunikasi massa juga meng-*encode* pesan-pesan yang memelihara hubungan dengan masyarakat lain serta menyampaikan kebudayaan baru kepada anggota-anggota masyarakat. Peluang ini dimungkinkan karena komunikasi massa mempunyai kemampuan memperluas pandangan, pendengaran dalam jarak yang hampir tidak terbatas, dan dapat melipatgandakan suara dan kata-kata secara luas. (Wiryanto 2000;10)

Pendapat Schramm pada dasarnya tidak berbeda dengan pendapat Harold D.Lasswell yang menyebutkan fungsi-fungsi komunikasi massa sebagai berikut.

- a. *Surveillance of the environment*
Fungsinya sebagai pengamatan lingkungan, yang oleh Schramm disebut sebagai decoder yang menjalankan fungsi *The Watcher* (pengamat lingkungan).

- b. *Correlation of the parts of society in responding to the environment*
Fungsinya menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungan. Schramm menamakan fungsi ini sebagai interpreter yang melakukan fungsi The Forum (cara menghubungkan informasi).
- c. *Transmission of the social heritage from one generation to the next*
Fungsinya penerusan atau pewarisan sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Schramm menamakan fungsi ini sebagai *encoder* yang menjalankan fungsi *The Teacher* (guru). (Wiryanto 2000;11)

Komunikasi massa yang terdiri dari unsur-unsur (*source*), pesan (*message*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*). Dimana Proses Komunikasi massa dapat dibahas dengan model S-M-C-R tersebut, atau dapat mengikuti formula Harold D.Lasswell, “*who, says what in which channel to whom and with what effect?*” *Who*, Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi maupun suatu negara sebagai komunikator. *Says What*, Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima (komunikan), dan sumber (komunikator atau isi informasi merupakan seperangkat symbol verbal/ non verbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan). Ada 3 komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna dan bentuk/organisasi pesan. *In Which Channel*, Wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima baik secara langsung (tatap muka, maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik). *To Whom*, Orang/kelompok/organisasi/suatu Negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan /penafsir/penyandi balik (*decoder*). (Wiryanto 2000;13)

What Effect?, Dampak/efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan dll. Unsur sumber (*who*) mengundang pertanyaan mengenai pengendalian pesan. Unsur pesan (*says what*) merupakan bahan untuk analisis isi. Saluran komunikasi (*in which Channel*) menarik untuk mengkaji mengenai analisis media. Unsur penerima (*to whom*) banyak digunakan untuk studi analisis khalayak. Unsur

pengaruh (*with what effect*) berhubungan erat dengan kajian mengenai efek pesan pada khalayak.

Dalam pembahasan ini dititikberatkan pada bagian media komunikasi itu mencapai dan mempengaruhi khalayaknya. Model ini mengikuti formula C-R-E. Pusat perhatian di tujukan kepada arus komunikasi massa, dimulai dari pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa sampai pada tanggapan atau efek pesan dari anggota-anggota di dalam *mass audience*. (Wiryanto 2000;13)

2.4.2. Komunikasi Politik

Komunikasi merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri perorangan, kelompok atau oraganisasi sebagai pengirim (*sander*) yang mengirimkan berbagai jenis informasi atau pesan terhadap orang lain, kelompok atau organisasi sebagai penerima pesan (*receiver*). Proses komunikasi dimulai ketika orang berkumpul (*party*), memiliki sebuah gagasan yang diharapkan dapat disampaikan kepada kelompok atau organisasi lainnya. Misi pengirim harus dapat dimengerti oleh penerima pesan. Difinisi ini dapat mengungkapkan, bahwa keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kemampuan pengirim dan penerima pesan. Makna yang menjadi fokus adalah bahwa, kesamaan dalam penafsiran pesan yang disampaikan pada kelompok penerima pesan, merupakan unsur penting. (Edwards 2000;78)

Komunikasi sebagai suatu keputusan yang harus diimplementasikan. Unsur informasi final dan harus dilaksanakan adalah penting dalam teori ini. Ada pula yang mengartikan komunikasi sebagai perpindahan pesan untuk meraih kesepahaman bersama dengan menggunakan simbol-simbol. Pemahaman bersama merupakan akibat dari perpindahan simbol verbal atau non verbal yang disampaikan, (Ivancivich 1988;65). Teori ini menunjukkan bahwa kesamaan dalam penafsiran pesan simbol antara pengirim dan penerima dalam berkomunikasi merupakan unsur penting difinisi ini. Komunikasi menggunakan simbol-simbol untuk memindahkan beberapa arti informasi, atau dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan proseees seseorang yang meliputi pertukaran

prilaku. Prilaku merupakan unsur penting dalam teori ini. Definisi lain dari komunikasi adalah perpindahan informasi dan pengertian dari satu orang atau kelompok kepada orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dari berbagai pengertian dan uraian tentang komunikasi yang telah dikemukakan tersebut, terlihat bahwa hakikat komunikasi adalah pertukaran pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain, atau satu kelompok untuk kelompok lain, yang dapat diungkapkan baik melalui bahasan lisan dan tulisan, gambar-gambar, isyarat, bunyi-bunyian maupun bentuk kode lain yang mengandung arti dan dimengerti oleh orang lain dengan tujuan yang berbeda-beda, baik tujuan positif maupun negatif. Proses komunikasi tersebut bila berlangsung dalam suatu organisasi maka komunikasi organisasi. Dan apabila hal tersebut terjadi pada partai politik ataupun pada perorangan, akan tetapi menyangkut masalah kekuasaan maka hal tersebut disebut komunikasi politik,(Nimmo 2000;66).

Lebih khusus mendefinisikan komunikasi organisasi secara fungsional sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Lebih jauh *Pace dan Faules* secara interpretatif mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai prilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi.

2.4.3.Faktor-Faktor Komunikasi Massa

Komunikasi dalam suatu organisasi termasuk organisasi politik berlangsung dalam tiga bentuk yakni horizontal vertical dan diagonal, termasuk komunikasi untuk keluar organisasi antar organisasi/partai lain dan perorangan.Masing-masing dari bentuk komunikasi tersebut adalah sebagai berikut (Hariyoto 2002:92)

1. Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas (*downward communication*) dan komunikasi dari bawah keatas (*upward communication*). Komunikasi ini adalah komunikasi yang berasal dari atas/pimpinan kebawah untuk anak buah dan anggota organisasi dan juga

bisa diluar anggota organisasi. Demikian juga komunikasi dapat berasal dari bawah dan bawahan, dan masuk untuk pimpinan secara timbal balik. Dalam sistem manajemen komunikasi vertikal dua arah ini sangat penting, sebab bila hanya satu arah saja dari pimpinan ke bawah, proses manajemen sangat mungkin tidak akan berjalan baik seperti yang diharapkan. Komunikasi vertikal dapat dilakukan secara langsung antara pimpinan dengan seluruh pegawai/ anggota organisasi, malahan dengan luar organisasi dalam kaitannya dengan partai politik, yaitu simpatisan. Komunikasi vertikal yang timbal balik dua arah merupakan pencerminan kepemimpinan yang demokratis, suatu jenis kepemimpinan terbaik diantara jenis-jenis kepemimpinan lainnya.

Namun, dalam dunia politik/kekuasaan, komunikasi vertikal yang paling penting adalah komunikasi dari bawah keatas. Komunikasi ke atas dalam politik berarti informasi mengalir dari bawah keatas secara berjenjang dalam suatu partai politik, atau informasi berjalan dari bawah yaitu dari rakyat yang paling bawah mengalir berjenjang atau langsung ke pusat kekuasaan. Pada dasarnya semua rakyat, baik yang terorganisir dalam bentuk partai politik atau organisasi masa lainnya, ataupun yang tidak terwadahi dalam organisasi mengadakan komunikasi ke atas.

Komunikasi tersebut bisa secara langsung atau diwakili oleh orang perorangan atau organisasi masa tertentu. Komunikasi tersebut isi pesannya bisa berupa "*demand/claim*" tertentu atau "*support*", ataupun kritik dan saran-saran. Atau secara mudah isi komunikasi tersebut bisa dalam dua bentuk yaitu, permohonan atau komentar.

Banyak ahli yang mengatakan, seperti yang dikutip oleh *Pace and Faules* (2002), bahwa komunikasi ke atas sangat penting karena beberapa alasan sebagai berikut, Informasi ke atas memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan baik untuk tingkat organisasi ataupun pada tingkat kekuasaan, oleh orang-orang yang mengarahkan organisasi atau kekuasaan atau yang mengawasi kegiatan orang-orang lainnya Komunikasi ke atas memberi tahukan kepada pengambil keputusan, kapan para bawahan/rakyat

siap menerima informasi dari mereka, dan seberapa baik bawahan/rakyat dapat menerima apa yang dikatakan kepada mereka.

Lebih jauh *Planty dan Machaver*, mengatakan, bahwa komunikasi dari bawah ke atas akan dapat : Menumbuhkan loyalitas dan apresiasi dari bawahan/rakyat karena pertanyaan/gagasan mereka diperhatikan. Menentukan apakah pada tingkat akar rumput atau bawahan mengerti tentang apa yang diharapkan dari informasi kebawah itu. Komunikasi ke atas memungkinkan, bahwa usulan-usulan dan keluhan-keluhan dari bawah bisa muncul dari bawah, hal-hal yang dapat mengganggu dapat diketahui (sedini mungkin). Meskipun komunikasi ke atas sangat penting, namun dalam kenyataan sulit dilakukan secara efektif. Menurut Sharma dalam bukunya, ada beberapa alasan yang membuat komunikasi ke atas menjadi sulit (Edwards 2000;97), yaitu :

- a). Kecenderungan bawahan/akar rumput akan menyembunyikan pikiran mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bawahan terutama pegawai negeri akan mendapatkan kesulitan bila mereka berbicara kepada atasan mereka. Dalam hal komunikasi politik, tentu rakyat takut bicara kepada kekuasaan.
- b). Perasaan, bahwa atasan, manajer, atau kekuasaan kurang tertarik kepada masalah-masalah bawahan. Mungkin disini karena atasan kurang memperhatikan komunikasi yang datang dari bawah.
- c). Perasaan, bahwa atasan atau pusat kekuasaan sangat sukar untuk dihubungi dan kurang tanggap pada komunikasi dari bawah.

Atas hal-hal tersebut diatas, Pace dan Faules dalam bukunya mengutip dari *Planty dan Machaver*, menyebutkan tujuh prinsip sebagai pedoman komunikasi keatas, yaitu:

- a). Komunikasi keatas yang efektif harus direncanakan;
- b). Harus berlangsung secara berkesinambungan;
- c). Menggunakan saluran rutin;
- d). Menitik beratkan pada kepekaan dalam menerima gagasan dari tingkat yang paling bawah;
- e). Harus mendengarkan secara obyektif;
- f). Tindakan yang cepat untuk menganggapi masalah;
- g). Efektif menggunakan media dan metoda untuk meningkatkan aliran komunikasi.

2. Komunikasi Herizontal

Komunikasi horizontal adalah komunikasi antara seseorang dengan seseorang lainnya, atau seseorang dengan sekelompok orang/masyarakat atau sebaliknya, dan sekelompok orang/masyarakat dengan sekelompok orang/masyarakat lainnya dengan tingkat kedudukan yang sama. Komunikasi horizontal sering berjalan dalam keadaan dan kondisi yang kurang tidak formal bila dibandingkan dengan komunikasi vertikal. Komunikasi tersebut bisa berjalan dalam jam kerja atau di luar jam kerja. Dalam dunia politik komunikasi ini yang paling banyak berjalan. Namun, dalam organisasi kerja ataupun organisasi politik, tujuan dari komunikasi horizontal menurut *Pace dan Faules*, antara lain :

- a). Untuk kordinasi penugasan-penugasan kerja.
- b). Untuk berbagi informasi tentang rencana kerja.
- c). Untuk tujuan pemecahan masalah.
- d). Untuk memperoleh pemahaman yang sama.
- e). Untuk berunding, perdamaian atau menengahi perbedaan-perbedaan.
- f). Untuk menumbuhkan dukungan antar orang /personil.

3. Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal atau komunikasi silang, yakni komunikasi yang berlangsung antara seseorang dengan seseorang lainnya/kelompok orang/lainya, atau sekelompok orang dengan kelompok lainnya dengan kedudukan yang berbeda atau unit yang berbeda. Orang-orang yang terlibat dalam komunikasi diagonal biasanya tidak menampilkan kekuatannya, seperti pada komunikasi vertikal. Untuk suatu organisasi, termasuk organisasi politik, menurut, komunikasi diagonal ini berlangsung antara dua satuan unit kerja yang berada pada jenjang hirarkhi organisasi yang berbeda. Akan tetapi mempunyai tujuan sama, yaitu tercapainya tujuan organisasi. Dalam dunia politik, arus komunikasi diagonal banyak terjadi, malahan mungkin tidak beraturan, sebab tujuannya adalah kekuasaan. Di samping tiga jenis komunikasi tersebut diatas, Terdapat 2 (dua) pola komunikasi, yaitu :

- a). Komunikasi searah, misalnya komunikasi dari atasan ke bawahan, perintah, penugasan, pengumuman dan lainnya. Dalam dunia politik

jenis komunikasi ini cukup banyak, misalnya dalam kampanye atau propaganda.

- b). Komunikasi dua arah/timbal balik, misalnya dalam percakapan, rapat-rapat, perundingan dan sebagainya. Dunia politikpun banyak menggunakan komunikasi ini dalam bentuk kampanye dialogis, dan perdebatan-perdebatan. (Deddy 2001:192)

Apapun bentuknya, komunikasi, terutama komunikasi politik tujuannya adalah pembentukan opini publik. Opini publik adalah suatu proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, (Nimmo 2004:192). Opini publik seperti halnya suatu proses, maka opini publik tersebut selalu berubah dan berkembang. Perkembangan tersebut terjadi karena adanya komunikasi, terutama komunikasi politik.

Melalui kegiatan komunikasi memberi-dan-menerima di antara makna dan tindakan inilah orang-orang memperoleh kecenderungan tertentu. Jadi manuver dalam pemberian makna tersebutlah, hakekatnya peran dari komunikasi politik dalam mempengaruhi para pemilih untuk berpihak, disamping sudah tentu ditentukan pula oleh tingkat pendidikan dan pengalaman dari pemilih itu sendiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Konseptual, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Konseptual

Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan petunjuk bagaimana dimensi pembinaan teritorial (Binter), Definisi adalah yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat sehingga tercipta kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara matra darat. Dengan saran :

a. Tinjauan Profesionalitas Aparat Teritorial.

- 1). Sikap dan Perilaku Aparat Teritorial
- 2). Kemampuan Aparat Teritorial:
 - a) Kemampuan Deteksi dini, Laporan cepat dan Cegah dini
 - b) Kemampuan penerapan Manajemen Teritorial.
 - c) Kemampuan Penguasaan Wilayah.
 - d) Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat.
 - e) Kemampuan Komunikasi Sosial.

- 3). Sarana dan prasarana
 - Kesiapan sarana dan parasarana
- b. Penerapan metoda pembinaan teritorial.
 - Pembinaan komunikasi sosial

3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Kisi-kisi instrumen penelitian memuat variabel yang digunakan dengan indikator masing-masing seperti pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 3.1. Kisi-Kisi dan Variabel Penelitian

DIMENSI	INDIKATOR	SUB
Tujuan profesionalitas aparat	Sikap dan perilaku aparat	Pembinaan teritorial
		Pembinaan paradiugama baru TNI
	Kemampuan aparat teritorial	Kemampuan deteksi dini
		Kemampuan lapor cepat dan cegah dini
		Pengamatan terhadap sumber dan anatomi konflik
		Kemampuan penerapan manajemen teritorial
		Pembinaan penguasaan wilayah
		Kemampuan penugasan wilayah
Penerapan metode	Konsep patnersihip	Komunikasi sosial sebagai metode (pendekatan linter sektoral/pemda)
		Komunikasi sosial sebagai kemampuan (Pendekatan unsur penunjang)

3.2.Desain Penelitian

Desain penelitian dimaksudkan sebagai tuntutan dalam mencari informasi, pengumpulan data dan observasi yang kemudian dianalisis. Laporan penelitian yang objektif dijelaskan oleh Moleong (2004 : 28):

Desain penelitian sebagai suatu rencana yang membimbing penelitian dalam proses pengumpulan, analisa dan enterpretasi observasi. Desan penelitian juga menentukan arah kemungkinan penetralisasi, yaitu apakah interprestasi yang dicapai dapat di generalisasikan terhadap suatu populasi yang lebih besar atau situasi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. *Penelitian Kualitatif* adalah penelitian yang menekankan

pada quality atau hal yang penting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/ gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan,(Satori, 2009:22). Sedagkan menurut Nawawi (2001:63) menyatakan :

Metode Deskriptif dapat artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian(seseorang, lembaga dan lain-lain)pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Atau usaha memecahkan masalah dengan membandingkan permasalahan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain yaitu dengan menguji hubungan antar konsep. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penulis dapat mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam konflik batas daerah/daerah kabupaten.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) adalah ”prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Kemudian menurut M.Nasir (2003:63) mengatakan:

Metode penelitian Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki.

Menurut Prasetya Irwan (2004:60) bahwa Metode penelitian deskriptif adalah ”penelitian yang bertujuan mendiskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pola pendekatan deskriptif yang dalam deskriptif ini bercirikan kegiatan pengumpulan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang

situasi yang dialami, hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan; atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, bertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (2003:63) bahwa desain deskriptif dapat diartikan "sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan (melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya".

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena- fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses langka kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Berg dalam (Satori, 2009:23) menyatakan dalam definisinya bahwa: " *Qualitative Research (QR) thus refers to the meaning, concepts, characteristics, methaport, simbols, and descriptions of things*". Pendekatan kualitatif cenderung mengarah pada penelitian yang bersifat naturalistik fenomenologis dan penelitian etnografi.

3.3. Data yang diperlukan

Sumber data menurut Amirin (200:132) berpendapat bahwa menurut derajat sumbernya, data terdiri dari dua jenis yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Sumber data menurut Rusidi (2006:28) adalah pihak yang memberikan data atau informasih, dengan kata lain adalah orang atau tempat pertama dimana data itu berasal. Dilihat dari orangnya ada dua sumber yaitu *Responden* dan *informan*. *Responden* adalah orang yang mampu memberikan data atau informasih tentang keadaan dirinya sendiri, sedangkan *informan* adalah orang yang mampu memberikan data atau informasih yang sebenar-benarnya tentang diri orang lain atau lingkungannya. Mengingat kecakupan wilayah dan keterbatasan waktu maka pengambilan sampel informan dilakukan dengan menggunakan random sampling, yakni pemilihan informan yang dilakukan melalui sistem acak, pada 12 kelurahan, yang ada di wilayah Sabang, 2 Organisasi KBT dan 4 LSM, pengambilan random dengan kaidah bahwa informan dalam penelitian adalah

figur yang dianggap dapat mewakili masyarakat dan ormas di wilayah Sabang, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Organsiasi	Sampel	Jumlah Responden
12 Kelurahan	7 Kelurahan	119 Orang responden
2 KBT	1 Kelurahan	7 Orang responden
4 LSM	1 LSM	7 Orang responden
	Jumlah	135 Orang responden

Pemilihan 7 Kelurahan diatas meliputi 3 Kelurahan di wilayah pesisir, 2 Kelurahan di wilayah dataran tinggi dan 2 kelurahan di wilayah kota.

3.3.1 Data Primer

Data *primer* adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa manusia, benda-benda dan tempat. Nasution mengatakan bahwa data *primer* merupakan data yang langsung diperoleh peneliti dari penelitian lapangan, dapat berupa catatan-catatan dari hasil penelitian (Nasution; 2002). Dalam penelitian ini digunakan kuesioner yang diarahkan kepada 135 orang responden, diberikan berdasarkan kecakupan wilayah meliputi totoh masyarakat gampong maupun mukim yang mewakili masyarakat adat, birokrat (Kepala Desa hingga Pejabat Pemerintah Daerah). Sedangkan responden Lembaga Swadaya Masyarakat adalah mereka yang berkecimpung di bidang advokasi, serta unsur dari Keluarga Besar TNI, meliputi unsur pengurus di wilayah.

3.3.2 Data Sekunder

Sedangkan data *sekunder* adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (Prasetya Irawan, 2004;87). “Data tersebut dimana data itu dikumpulkan untuk melengkapi data *primer*. Data *sekunder* diperoleh dengan penelitian terhadap dokumen, laporan-laporan, brosur, surat kabar dan bahan lainnya yang berkaitan sesuai dengan judul penelitian”.

3.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, dan juga harus tepat dan sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu berdasarkan dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau uraian gambaran, penelitian ini disebut metode penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu dimaksudkan untuk pengukuran secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dengan menggunakan pedoman/teknik pengantar wawancara sebagai pedoman serta selanjutnya penulis menganalisis data secara deskriptif. Dengan model penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta aktual dilapangan (Effendi dan Singgarimbun 1995 :4), dengan demikian dari segi metodologi karena penelitian dengan jenis data kualitatif, maka penelitiannya harus lebih banyak menguasai berbagai teknik pengumpulan data (Sugiono, 2002:16).

Menurut Arikunto (2004:223), ”pengumpulan data adalah juga dapat disebutkan sebagai prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data dengan masalah-masalah penelitian yang diperoleh”. Sedangkan menurut Nazir (1999:211), ” pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian”. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik dokumentasi, dan study kepustakaan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen (gambar atau karya-karya) yang berkaitan dengan judul penelitian/objek penelitian. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan, pelayanan publik. Menurut Sugiono (2002: 85) ”dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Penelitian data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun sumber-sumber lainnya bersifat tercatat dan mendeskripsikan secara tertulis maupun gambar/bagan/table, peta yang berkaitan dan dianggap perlu untuk mengetahui serta dapat membantu menganalisaan fokus permasalahan penelitian”.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Prasetya Irawan (2004 :100), Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang di dapatkan dimana kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena.

Analisis data menurut Bagan dan Beglen dalam Burhan (4004 : 248) mengemukakan bahwa Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Selanjutnya Sugiono (2005 : 89) mengemukakan bahwa:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam, unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Mulyana (2001 : 156) berpendapat bahwa :” salah ciri penelitian kualitatif adalah tidak ada hipotesis yang spesifik pada saat penelitian dimulai, hipotesis justru dibangun selama tahap-tahap penelitian, setelah diuji di konfrontasi dengan data yang diperoleh peneliti selama penelitian tersebut.

Teknik triangulasi dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, Sugiyono (2005 : 209). Triangulasi seyogyanya dipakai sebab tidak ada metode tunggal pun yang menunjukkan ciri-ciri relevan realitis empiris yang diperlukan untuk membangun suatu teori. Triangulasi penting untuk mengkonfirmasi tingkat kepercayaan temuan penelitian.

Proses tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Seleksi data, yaitu proses penyederhaan yang dilakukan dengan menyeleksi (editing) antara data-data yang diperlukan dengan data-data yang tidak diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan. Hal tersebut diungkapkan oleh Nasir (1999;406) "sebelum data dioleh, data tersebut perlu diaudit/diteliti terlebih dahulu.
2. Klasifikasi data, yaitu: "penggolongan data dalam bentuk bola kedudukan, kuantitas atau dapat menimbulkan sesuatu gerak (dinamika) antara fenomena-fenomena" (Asyari, 1981; 100-101).
3. Interpretasi data, yaitu menganalisis dan mencari arti yang lebih luas dari data yang ada dan menghubungkannya dengan landasan teori yang diajukan dalam penelitian. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Nazir (1999; 437) yaitu: "bahawa penafsiran atau interpretasi data tidak lain dari pencari pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan.

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan data kualitatif, sehingga penulis menggunakan strategi analisis kualitatif yakni digunakan untuk menganalisis, memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut. Sehingga peneliti menggunakan model tahapan analisis induktif seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2007 : 144) adalah: (1) Melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial, melakukan identifikasi, revisi-revisi pengecekan ulang dan *coding* terhadap data yang ada. (2) Melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh. (3) Menelusuri dan menjelaskan kategorisasi. (4) Menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi. (5) Menarik kesimpulan-kesimpulan umum dan (6) Membangun dan membangun teori.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Wilayah Kota Sabang Provinsi Aceh

Wilayah administrasi Kota Sabang, secara geografis, terletak di antara 95° 13' 02" dan 95° 22' 36" Bujur Timur, dan 05° 46' 28" dan 05° 54' 28" Lintang Utara. Dari segi geografis Indonesia, wilayah Kota Sabang merupakan wilayah administratif paling barat, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat

Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah *vrij haven* dan dikelola *Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station* yang selanjutnya dikenal dengan nama *Sabang Maatschaappij*. Perang Dunia II ikut mempengaruhi kondisi Sabang dimana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibombardir pesawat Sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat Pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Semua aset Pelabuhan Sabang Maatschaappij dibeli Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.

Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No 3/1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU No 10/1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerja Sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang membuat Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan.

Pada tahun 1997 di Pantai Gapang, Sabang, berlangsung Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang diprakarsai BPPT dengan fokus kajian ingin mengembangkan kembali Sabang. Disusul kemudian pada tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppes No. 171 tanggal 28 September 1998.

Era baru untuk Sabang, ketika pada tahun 2000 terjadi Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Inpres No. 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. Dan kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Aktifitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke Kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktifitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.

Sabang juga mengalami Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, namun karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam mengakibatkan Sabang selamat dari tsunami. Sehingga kemudian Sabang dijadikan sebagai tempat transit Udara dan Laut yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Sabang menetapkan Sabang sebagai tempat transit untuk pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh.

Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah,

membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah *vrij haven* dan dikelola *Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station* yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang *Maatschaappij*. Perang Dunia II ikut mempengaruhi kondisi Sabang dimana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibom pesawat Sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Semua aset pelabuhan Sabang *Maatschaappij* dibeli Pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas.

Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No 3/1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU No 10/1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerja Sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang membuat Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan.

Kondisi Sabang sebagai pintu gerbang NKRI, memiliki tingkat resistensi tinggi baik dari potensi Ideologi maupun potensi kerawanan lainnya, dengan demikian permasalahan teritorial Kota Sabang harus bercirikan teritorial Indonesia dengan bercirikan keadaan iklim, kekayaan sumberdaya alamnya, dan sosial politik masyarakat Indonesia. Kekhasan tersebut menyebabkan Indonesia merupakan daerah penyangga (*bufferzone*) dari beberapa gatra, diantaranya:

1. **Politik.**-- Indonesia berada diantara dua sistem politik yang berbeda, yakni sistem demokrasi Australia dan sistem demokrasi Asia Selatan;
2. **Ekonomi.**-- Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan sistem ekonomi sentral Asia;
3. **Ideologi.**-- Indonesia berada diantara ideologi kapitalisme di Selatan dan ideologi komunis di sebelah utara;

4. ***Sistem Pertahanan.***-- Indonesia berada diantara sistem pertahanan maritim di selatan dan sistem pertahanan kontinental di sebelah utara.

Untuk itulah maka masalah teritorial dan penanganannya di Indonesia membutuhkan sesuatu pendekatan yang spesifik melalui suatu prosedur ‘geostrategi’ yang baik, agar diperoleh: (a). pembinaan wilayah yang dapat menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif di berbagai bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan keberlanjutan pembangunan nasional), (b). faktor kesejahteraan dan keamanan bangsa, dan (c). Pembinaan teritorial yang menitikberatkan pada penyusunan potensi pertahanan dan keamanan (Hankam).

Pembinaan Teritorial bagi TNI adalah upaya, pekerjaan dan tindakan, baik secara berdiri sendiri maupun bersama dengan aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan matra darat, laut dan udara; yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemandirian TNI dan Rakyat, yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI. Apabila dikaitkan dengan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) butir b angka 8, disebutkan bahwa tugas TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Dasar hukum yang berkaitan dengan pembinaan teritorial dalam mendukung ketahanan nasional tersebut, adalah:

- a. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) tentang Pertahanan dan Keamanan Negara: “Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan Utama, dan rakyat sebagai Kekuatan Pendukung”.
- b. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 ayat (2): “Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh cadangan dan Komponen Pendukung”.
- c. UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8d, tentang tugas TNI AD : “Angkatan Darat bertugas melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat”.

4.2. Kesepakatan Helsinki dan Implikasi

Melihat kecerahan Aceh baru dengan warna kedamaian serta potensi aceh sebagai pintu gerbang nasional, maka wilayah-wilayah dalam demografi Aceh menjadi bagian integral dalam konsep pembangunan Aceh termasuk didalamnya Sabang sebagai garis awal memasuki wilayah NKRI, Demografi Kota Sabang terletak pada 05046 28 05054 28 Lintang Utara dan 95013 02 - 95022 36 Bujur Timur. Berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat, dengan luas wilayah keseluruhan 153 Km², memasuki dinamika baru Aceh pasca Helsinki, dalam perjanjian Helsinki di atur 12 Butir kesepakatan sebagai berikut :

1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini,
2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya, anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini
3. GAM melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat menyerahkan 840 buah senjata.
4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.
5. Pemerintah RI akan menarik tentara dan polisi non-organik dari Aceh.
6. Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap, dengan penyerahan senjata GAM, setelah diperiksa setiap tahap oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.
7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.
8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu pleton perlu diberituhkan sebelumnya kepada *Misi Monitoring*,
9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun.
10. Polisi organik akan bertanggungjawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh.
11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.

12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain kedua belas butir tersebut, dalam butir lain secara implisit juga disebutkan bahwa "anggota GAM dapat memiliki akses untuk masuk menjadi anggota Polri dan TNI". Ini menggambarkan bahwa ada upaya reintegrasi secara militer dalam proses penyelesaian konflik Aceh, dengan cara diperbolehkannya mantan anggota GAM untuk menjadi bagian dari TNI dan Polri. Dari segi substansi, masalah ini bukanlah cara yang baru sama sekali, karena salah satu poin dalam perjanjian untuk mengakhiri pemberontakan *Daud Bareueuh* tahun 1963 adalah melalui proses reintegrasi pasukan DI/TII ke dalam TNI waktu itu. Cara ini relatif lebih berhasil, karena dengan reintegrasi melalui militer, ada proses internalisasi dan sosialisasi atas NKRI dan secara perlahan dapat memupus ideologi "merdeka" yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini, model Helsinki dapat menginspirasi penyelesaian konflik, di negara-negara lain atau bagi pihak-pihak (khususnya negara) yang mengalami masalah yang hampir sama.

Resolusi konflik dalam kasus Aceh mengandaikan bahwa perdamaian dapat diwujudkan apabila kekuatan-kekuatan bersenjata dapat ditundukkan melalui suatu perjanjian yang mengikat, dan adanya pihak ketiga yang bisa menjadi eksekutor kesepakatan perjanjian. Karena itu, butir-butir perjanjian Helsinki mengenai Pengaturan Keamanan pada intinya adalah prasyarat awal bagi tumbuhnya perdamaian yang lebih baik di Aceh. Dengan kata lain, kedua belas perjanjian yang telah disebutkan di atas merupakan upaya kedua belah pihak untuk mengelola kekuatan militer masing-masing, dalam arti melakukan demiliterisasi pihak-pihak yang selama ini bertikai, baik TNI-Polri maupun GAM agar taat dengan perjanjian yang telah ditandatangani, jumlah GAM dikatakan sebanyak 3.000 orang, sedangkan jumlah TNI dan Polisi "tidak jelas," sehingga akhirnya disepakati, walau tidak jelas bagaimana angka ini ditetapkan bahwa hanya 9.100 orang Polisi dan 14.700 orang TNI yang diperbolehkan untuk tetap di Aceh.

Mengenai jumlah senjata yang harus diserahkan oleh pihak GAM, banyak kontroversi yang terjadi. Begitu juga dalam hal jumlah personal GAM yang akan melakukan demobilisasi disepakati sebanyak 3.000 orang (Pom 4.2). Padahal pihak GAM sendiri mengaku jumlahnya lebih dari itu. Menurut Panglima Perang GAM wilayah Batee Iliek, Darwis Jeunib, kekuatan pasukan di wilayahnya lebih dari 3.000 personel, dan senjata yang mereka miliki berjumlah 109 pucuk. Ini belum termasuk mereka (dan senjata) yang ada di daerah-daerah lain. Oleh sebab itu jumlah yang disepakati dalam perjanjian sama sekali tidak tepat.

Data perkiraan TNI tentang kekuatan dan dislokasi GAM menyebutkan bahwa personel mereka sebanyak 3.469 orang, dengan 1.793 pucuk senjata, dan bahwa mereka tersebar di Sabang, Pidie, B. Iliek, Pase, Peurelak, Tamiang, Alas, Aceh Selatan dan Singkil, Aceh Tengah.

Angka kekuatan GAM yang berjumlah 3.000 orang dengan 840 senjata memang adalah data perkiraan, artinya tidak ada data yang tepat mengenai hal itu, dengan demikian walaupun pihak GAM benar-benar menyerahkan senjata sebanyak 840, ini bukan berarti bahwa "senjata milik GAM" yang berada di Aceh sepenuhnya sudah diserahkan. Hal-hal semacam ini di belakang hari sesungguhnya dapat menimbulkan potensi pertentangan baru, khususnya apabila mereka ternyata masih bersenjata saat dikembalikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, patut disayangkan bahwa pihak AMM juga tidak memiliki kapasttas untuk mengubah angka-angka dalam perjanjian.

Walaupun data tentang jumlah anggota GAM dan pucuk senjata yang mereka miliki masih simpang siur, AMM bekerja dengan menggunakan poin [(1) GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan (2) GAM melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat menyerahkan 840 pucuk senjata.]

Kontroversi tentang kesimpang-siuran data ini berangkat dari kelemahan poin (3) diatas yang tidak menyebutkan kriteria dan spesifikasi senjata seperti apa yang harus diserahkan oleh pihak GAM. Seharusnya AMM bisa membuat kriteria dan spesifikasi senjata yang dimaksud. Namun, tampaknya mereka tidak [ingin] melakukan hal itu. Akibatnya, ada perselisihan dengan jumlah yang didata oleh pihak TNI.

Masalah lain pasca Helsinki adalah pembinaan terhadap eks tentara GAM dimana pada *post decommissioning* tampaknya ada beberapa pilihan yang memungkinkan bagi mantan prajurit GAM.

Pertama, untuk alasan organisatoris bahwa bekas prajurit GAM (TNA) tidak mungkin dilepaskan begitu saja ke dalam masyarakat karena mereka masih memiliki watak atau karakter militer, maka salah satu fungsi KPA adalah menjadi payung bagi mantan TNA. Komite itu adalah badan GAM yang bertugas untuk membantu peralihan pasukan TNA menjadi sipil. Dengan kata lain KPA adalah organisasi transisional bagi bekas prajurit GAM. Wadah inilah yang kemudian akan mengikat para TNA dalam sebuah organisasi sipil. Ia akan menunggu sampai para TNA benar-benar bisa berperan sebagaimana layaknya masyarakat sipil biasa. "Seperti mendapat pekerjaan dan kehidupan.

Kedua, pembubaran TNA dan lahirnya KPA adalah bentuk transisional dari perjuangan anggota GAM yang tidak lagi mengangkat senjata (strategi militer) tetapi lebih condong melalui strategi politik. Karena itu, KPA juga akan menjadi wadah transisional yang memfasilitasi anggotanya hingga memperoleh tujuan yang mereka inginkan, baik secara politik maupun ekonomi. Bahkan, KPA telah menjadi "embrio" bagi lahirnya partai politik lokal di Aceh (Partai Aceh atau di singkat PA). Dengan cara ini, GAM memang mentransformasikan anggotanya yang dulu sebagai prajurit untuk menjadi warganegara dengan kehidupan masyarakat biasa untuk memulai perjuangan GAM secara politik sebagaimana yang mereka kemukakan sendiri. Tentu saja strategi ini adalah kebalikan dari masa-masa awal pertumbuhan GAM di tahun 1976 di mana strategi yang dipilih adalah strategi militer,

dengan alasan untuk memperkuat diri dalam melakukan tawar-menawar politik dengan Jakarta. Waktu itu mereka memahami bahwa dengan kelompok yang belum kuat, GAM tidak mungkin melakukan strategi dan *bargaining* politik.

Dengan kata lain, berubahnya strategi perjuangan dari militer ke strategi politik menunjukkan bahwa setelah perjuangan yang amat panjang, secara organisatoris GAM cukup kuat dan *solid*, baik di Aceh maupun di luar Aceh.

Ketiga, sebagaimana tercatat dalam MoU Helsinki, dan kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa bekas prajurit GAM memiliki akses untuk menjadi anggota TNI maupun Polri, walalupun tentunya dengan berbagai persyaratan administratif yang telah diatur dalam rekrutmen TNI maupun Polri. Namun perlu dipertanyakan di sini: Apakah ada jaminan bahwa semua anggota TNA yang berjuang, akan dapat dengan mudah menjadi anggota TNI dan Polri? Sejauhmana proses ini dapat menjamin bahwa semua anggota TNA dapat memperoleh akses yang sama, karena tingkat pendidikan mereka yang rata-rata rendah.

4.3. Analisa

Dalam kajian Pembinaan Teritorial Pasca Perjanjian Helsinki, dengan pendekatan komunikasi sosial TNI melalui 3 tiga dimensi utama ; sikap perilaku personel, kemampuan personel teritorial dan konsep *patnership*,

1. Sikap perilaku personel

Menyikapi fenomena terhadap ancaman disintegrasi bangsa yang bersumber dari terjadinya serangkaian konflik dalam kehidupan masyarakat dan goyahnya sendi-sendi kondisi sosial masyarakat, bila tidak dapat segera teratasi dan tertangani secara tuntas diprediksikan akan dapat merusak sistem pertahanan negara yang pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya instabilitas keamanan nasional. Menghadapi situasi tersebut maka tuntutan mendesak yang perlu segera dilakukan adalah penanganan dan penyelesaian konflik, meniadakan serta meredam aksi *separatesme* dan

mewujudkan ketahanan wilayah, tugas tersebut tidak mampu bila hanya dilakukan oleh salah satu komponen bangsa, tetapi lebih pada penanganan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh institusi pemerintah termasuk TNI bersama dengan komponen bangsa lainnya.

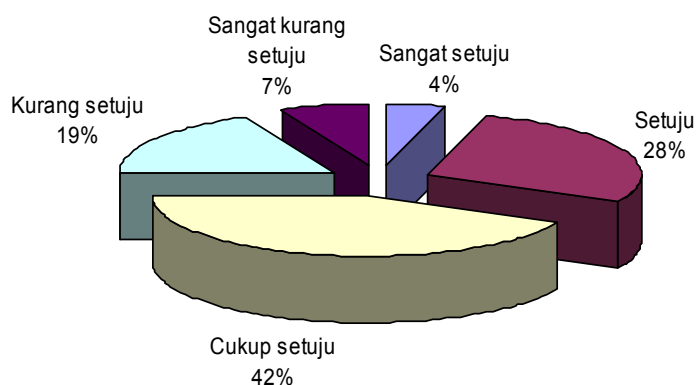
TNI AD sebagai salah satu komponen TNI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pertahanan negara didarat dituntut untuk mampu mengatasi ancaman tersebut dengan mengoptimalkan fungsi pembinaan teritorial ditiap-tiap Komando Kewilayahan. Belajar dari pengalaman tersebut, maka saat ini dan kedepan TNI harus mampu tampil secara profesional dan proporsional sesuai fungsi dan perannya sebagai alat negara dibidang pertahanan, oleh karenanya TNI harus kembali kepada jati dirinya sebagaimana yang telah di gariskan dalam UU No. 34 Th. 2004 tentang tugas pokok TNI.

Sebagai tentara profesional, TNI telah memiliki komitmen untuk menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis serta berada dibawah kekuasaan pemerintah yang dipilih rakyat secara kontitusional dan demokratis.

Pembinaan teritorial yang lahir ditengah-tengah perjuangan bangsa bertujuan menciptakan semangat persatuan dan kesatuan khususnya antara TNI dengan Rakyat. Semangat inilah yang merupakan tuntutan terhadap personel teritorial Kodim agar senantiasa memiliki sikap dan perilaku prajurit yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Sikap dan perilaku yang tercermin dari para personel teritorial saat ini pada umumnya sudah baik, namun demikian masih terdapat sikap dan perilaku personel teritorial dilapangan yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai prajurit rakyat, sehingga menimbulkan citra negatif oleh masyarakat terhadap keberadaan TNI ditengah masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut khususnya terhadap sikap personal TNI AD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam komunikasi sosial khususnya di wilayah Kota Sabang dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Kumulatif Penilaian Responden Atas Sikap perilaku personel

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN					NILAI	Ket
		SB	B	CB	KB	SKB		
1	Penilaian saudara terhadap sikap petugas dalam pembinaan teritorial	4	39	51	29	12	399	Cukup setuju
2	Penilaian saudara terhadap sikap petugas dalam memberikan penjelasan berkenaan dengan paradigma baru TNI	6	33	54	33	9	399	Cukup setuju
3	Penilaian saudara terhadap penyampaian yang diberikan oleh petugas dalam melaksanakan pembinaan teritorial	9	42	57	17	10	428	Cukup setuju
4	Penilaian saudara terhadap penggunaan bahasa yang baik dalam pemberian penjelasan materi pembinaan teritorial	6	37	67	20	5	430	Cukup setuju
Rata-rata tanggapan..		6	28	57	25	9	414	Cukup setuju



Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukan bahwa untuk responden yang memberikan penilaian bahwa sikap personal berada pada konsisi sangat setuju ada sebanyak 4% terhadap responden dengan penilaian setuju ada sebanyak 28% untuk responden dengan penilaian kurang setuju

ada sebanyak 19% terhadap responden dengan penilaian kurang setuju ada sebanyak 19% untuk responden dengan penilaian cukup setuju ada sebanyak 42%. Dari hasil pengolahan data secara kumulatif menunjukkan bahwa pandangan responden terhadap sikap personal berada pada kategori cukup setuju.

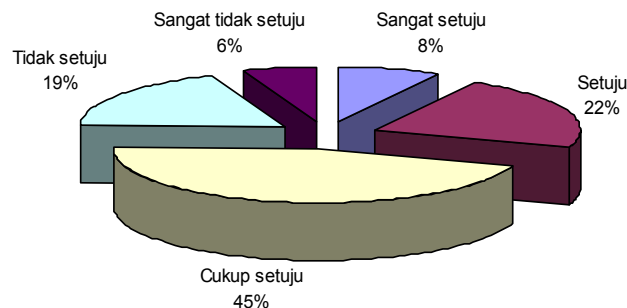
2. Kemampuan Personel

Program pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem keamanan masyarakat sehingga mampu melindungi, melayani dan mengayomi seluruh warga masyarakat Indonesia dari gangguan kamtibmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran program ini adalah terwujudnya paradigma baru TNI yang profesional sebagai penanggung jawab dan pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu mendukung segenap komitmen/kesepakatan nasional, namun sebagaimana data diatas, bahwa ditariknya pasukan organik memiliki dampak terhadap sikap personal TNI dalam memberikan pembinaan wilayah, mereka sulit untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Langkah-langkah yang dilakukan pada program ini adalah mengembangkan profesionalitas dan kesiapan yang handal bagi anggota, menyempurnakan piranti lunak dan mengembangkan wawasan paradigma baru TNI di daerah :

Tabel 4.2.
Kumulatif Penilaian Responden Atas Kemampuan Personel Dalam
Pembinaan Wilayah Pertahanan di Kabupten Sabang

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN					NILAI	Ket
		SB	B	CB	KB	SKB		
1	Penilaian saudara terhadap kemampuan aparat dalam melakukan pendeteksian dini terhadap informasi yang sampai berkenaan dengan masalah-masalah sensitif dan keamanan negara	7	29	67	26	6	410	Cukup setuju
2	Penilaian saudara terhadap kemampuan personel dalam menelusuri sumber informasi,	14	38	45	28	10	423	Cukup setuju
3	Penilaian saudara terhadap kemampuan menganalisa subyek dan obyek dari informasi	10	37	33	52	3	404	Cukup setuju
4	Penilaian saudara terhadap kecepatan pelaporan yang dilakukan personel bila di dapat informasi berkenaan dengan masalah sensitif dan keamanan negara	13	37	59	22	4	438	Setuju
5	Penilaian saudara terhadap kemampuan personal dalam melakukan cegah terhadap insue dalam wilayah teritorial	9	31	66	19	10	415	Cukup setuju
6	Penilaian saudara terhadap kemampuan personal dalam memberikan penjelasan-penjelasan secara baik dan terinci terhadap isue yang berkembang dimasyarakat untuk selanjutnya isue tersebut di netalisir serta dikendalikan	6	35	64	22	8	414	Cukup setuju
7	Penilaian saudara terhadap kemampuan personal untuk melakukan pengamatan terhadap anatomi konflik dalam wilayah teritorial	0	4	63	32	12	381	Cukup setuju
8	Penilaian saudara terhadap kemampuan melakukan pemetaan permasalahan dalam rangka melakukan bedah anatomi konflik dalam wilayah teritorial	12	35	58	20	10	424	Cukup setuju
9	Penilaian saudara terhadap kemampuan Kodim 0112 Kota Sabang dalam melakukan penetapan manajemen teritorial	14	28	70	12	11	427	Cukup setuju
10	Penilaian saudara terhadap kemampuan Kodim 0112 Kota Sabang dalam melakukan pembinaan dalam wilayah teritorial	11	33	68	17	6	431	Cukup setuju
11	Penilaian saudara terhadap penguasaan pengamatan dan analisis cegah tangkal dalam wilayah teritorial	16	27	62	19	11	423	Cukup setuju
Rata-rata tanggapan..		11	30	61	25	8		Cukup setuju



Dari hasil pengolahan data terhadap penilaian responden pada dimensi kemampuan personel terlihat bahwa untuk responden (masyarakat) memberikan penilaian sangat setuju ada sebanyak 8%, untuk responden dengan penilaian setuju ada sebanyak 22% terhadap responden dengan penilaian cukup setuju ada sebanyak 45% sedangkan responden dengan penilaian tidak setuju ada sebanyak 19% terhadap responden dengan penilaian sangat tidak setuju ada sebanyak 6%. Dengan demikian bila melihat nilai pernyataan kumulatif responden pada dimensi ini memperlihatkan bahwa sebanyak 75% responden memberikan penilaian positif sedangkan responden dengan penilaian bahwa personal kurang mampu menyampaikan komunikasi sosial sebanyak 25%.

3. Konsep *Partnership*

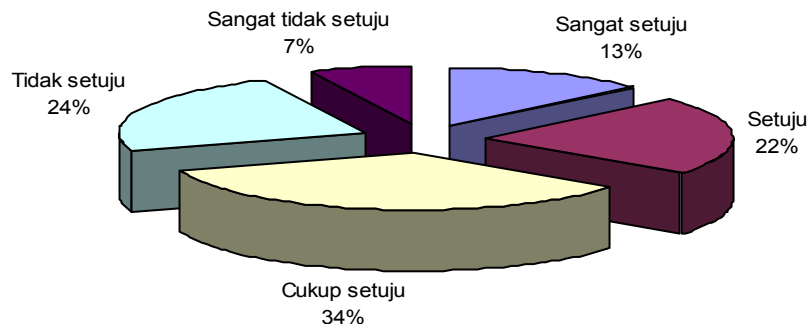
Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada pasal 22 butir (a) Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa dalam rangka otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, secara implisit Pemerintah Daerah semestinya juga memiliki peran dalam urusan Pertahanan dalam aspek tertentu, khususnya program Pembinaan Teritorial dalam hal ini penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan termasuk mengalokasikan anggaran melalui APBD.

Sejauh ini, terdapat perbedaan pendapat dari kalangan akademisi tentang bagaimana gelar kekuatan TNI AD khususnya Komando Kewilayahan seharusnya dilakukan dihadapkan dengan otonomi daerah saat ini, apakah Pembinaan Teritorial yang dilakukan Kowil TNI AD merupakan komplementer (pelengkap) atau substitusi (pengganti) dari kewenangan Pemerintah Daerah, Aspek lain yang juga menjadi pertanyaan dalam konteks implementasi Pembinaan Teritorial oleh Komando Kewilayahan TNI AD, yaitu terkait dengan pasal 27 ayat (2) huruf b butir 9 dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan membantu tugas pemerintahan di daerah.

Berkenaan dengan konsep *partnership* dalam pembinaan wilayah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Kumulatif Penilaian Responden Konsep *Partnership* Dalam
Pembinaan Wilayah Pertahanan di Kabupten Sabang

NO	PERTANYAAN	PENILAIAN					NILAI	Rata
		SB	B	CB	KB	SKB		
1	Penilaian Saudara terhadap kemampuan Kodim 0112 khususnya terhadap pemberian metode pembinaan	27	40	32	25	11	452	3.34
2	Penilaian saudara terhadap kemampuan Kondim 0112 khususnya dalam mengikat komunikasi lintas sektoral dengan institusi pemerintah (Pemda) dalam rangka pembinaan wilayah teritorial	13	32	30	56	4	399	2.95
3	Penilaian saudara terhadap kemampuan Kodim 0112 khususnya dalam mengkomunikasikan pembinaan wilayah teritorial dengan memanfaatkan jaringan ulama	30	31	40	24	10	452	3.34
4	Penilaian asudara terhadap kemampuan Kodim 0112 melakukan pendekatannya dengan LSM dalam rangka pembinaan teritorial	15	26	55	26	13	409	3.03
5	Penilaian saudara terhadap kemampuan kodim 0112 melakukan pendekatan KTB di wilayah teritorial	5	23	72	27	8	395	2.92
		18	30	48	32	9		



Dari hasil pengolahan data terhadap dimensi *partnership* terlihat bahwa untuk responden dengan penilaian sangat setuju ada sebanyak 13% responden dengan penilaian setuju ada sebanyak 22% terhadap responden dengan penilaian cukup setuju ada sebanyak 34% adapun responden dengan penilaian tidak setuju ada sebanyak 24% untuk responden dengan penilaian sangat tidak setuju ada sebanyak 7%.

Dengan demikian bila melihat hasil penilaian secara kumulatif terlihat bahwa untuk responden dengan penilaian positif ada sebanyak 69% sedangkan untuk responden dengan penilaian bahwa dimensi ini negatif ada sebanyak 31%

Indonesia sebagai negara yang besar dengan wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dengan konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), menuntut seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dalam menjaga wilayah dan sumber daya yang ada serta menjaga kedaulatan RI. Kita harus bisa dan berusaha untuk mengesampingkan kesan bahwa Komando Kewilayahan merupakan upaya TNI untuk masuk dalam politik praktis, karena selama reformasi berjalan beberapa kewenangan TNI sudah dipangkas, baik perannya di DPR, dihapusnya Dwi Fungsi maupun pengambilalihan bisnis TNI oleh Pemerintah, pemisahan TNI dengan Polri dan hanya mengemban tugas pertahanan. Semua ini telah mengindikasikan, bahwa fungsi, dan peran TNI saat ini sudah jauh berbeda dari masa orde baru, sehingga tugas pembinaan teritorial kini juga bukan hanya dilakukan

oleh TNI saja namun seluruh elemen masyarakat juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan teritorial sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

Kenyataan yang kita rasakan secara langsung dan manfaat adanya Koter, adalah di dalam kepeduliannya ikut pada setiap penanggulangan bencana. Hal ini dimungkinkan karena kedudukan komando kewilayahan yang menyebar di seluruh kecamatan sampai pada pelosok desa, menjadi harapan masyarakat dalam upaya pertama pertolongan setiap ancaman keselamatan masyarakat, baik itu ancaman keamanan maupun ancaman bencana alam. Selain itu terlepas dari persoalan TNI saat ini, yang jelas keberadaan tentara di tengah masyarakat pedesaan dengan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa), telah mampu memberdayakan masyarakat dengan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik, paling tidak konsep TMMD telah menjadi motivator dan motor penggerak pembangunan dan kegiatan masyarakat desa. Sehingga apabila Pembinaan Komando Kewilayahan ini dirancang dengan baik, akan berdampak pada peningkatan daya dukung ketahanan lingkungan masyarakat dan ketahanan bangsa, dan terbangunnya keterpaduan antara TNI dan Rakyat.

Pembinaan Teritorial bila dirancang melalui pendekatan kultur dan peningkatan keterampilan, dapat berbuah ekonomi kesejahteraan yang berkedaulatan rakyat sehingga kedudukan TNI dimaknai sebagai penguat bina ketahanan rakyat dan perekat bangsa, terutama dalam menghadapi arus globalisasi yang dapat menggerus ketahanan bangsa. Kalau Internasional sudah mengakui keunggulan konsep teritorial tentu kita tidak perlu meragukan lagi bahwa konsep gagasan TNI itu memang bermakna bagi bangsa dan Negara

4.3.1. Faktor Internal

a. Pembinaan Teritorial Terhadap Kemampuan Menempatkan Komunikasi sebagai metode

Binter adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD yang pada intinya menciptakan kondisi lingkungan/wilayah/daerah agar dapat mendukung tugas-tugas TNI AD dalam melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Dengan demikian jelas bahwa peran TNI AD dalam Pembinaan Teritorial adalah melakukan penyiapan aspek Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial agar terwujud suatu Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh sehingga dapat diberdayakan untuk mendukung tugas-tugas TNI AD dalam melaksanakan OMP dan OMSP. Selanjutnya TNI AD memberikan tugas pokok Pembinaan Teritorial kepada Komando Kewilayahan TNI AD yaitu Kodam, Korem, Kodim sampai dengan Koramil. Adapun metode yang digunakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial yaitu Bintahwil, Komsos dan Bhakti TNI.

Implementasinya di lapangan, Pembinaan Teritorial dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD pada tataran Operasional dan Taktis. Tetapi bagaimanapun juga, Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dalam tataran Politis dan Strategis terkait dengan program Binter yang dimaksud. Pembinaan Teritorial merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental guna kepentingan bangsa dan negara, khususnya di bidang pertahanan matra darat.

Konsep Pembinaan Teritorial memerlukan upaya revitalisasi dan reaktualisasi secara kultural maupun konseptual untuk menghilangkan dikotomi 'Pembina vs yang dibina' dan mentalitas 'Penguasa dan yang

dikuasai', sehingga terwujud kesepahaman diantara seluruh komponen bangsa bahwa Pembinaan Teritorial sebagai bagian dari urusan Pertahanan, merupakan tanggung jawab bersama.

Pendekatan yang perlu dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program Binter adalah menerapkan konsep *partnership* (kemitraan) dengan pola *Networking* dimana TNI AD, Pemerintah Daerah, LSM, dan lainnya perlu dilibatkan sehingga tercipta *sense of belonging* di seluruh komponen bangsa terhadap keberhasilan program Pembinaan territorial. Binter merupakan fungsi utama TNI, yang dilaksanakan untuk memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah dalam bentuk ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh guna penyiapan pertahanan negar.

Penyelenggaraan Binter diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal agar mampu memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan yang dapat dijadikan modal untuk membantu Pemda meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan Teritorial dilaksanakan secara terus menerus dengan melibatkan instansi terkait terutama Pemerintah, Masyarakat atau Lembaga Non Departemen serta TNI AD sebagai inti secara terpadu dengan menggunakan pembinaan teritorial dengan metode *Bhakti TNI*, *Pembinaan Ketahanan Wilayah* dan *Pembinaan Komunikasi Sosial*. Dalam kaitannya dengan intern personel kowil itu sendiri, bermuara pada kualitas dan kuantitas penguasaan personil terhadap pembinaan teritorial, yang pada akhirnya berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan Binter. menyadari bahwa pelaksanaan Binter penting dalam mendukung tugas pemerintah daerah, maka diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul diseputar Binter.

Agar personel kowil dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya membantu pemerintah daerah, langkah yang dapat diambil meliputi : Pertama, melalui *Kebijakan*, yaitu perlu adanya regulasi setingkat UU dan

PP yang diusulkan kepada pemerintah dengan mencantumkan pelibatan Pemda secara proporsional dalam pelaksanaan Bhakti TNI yang dapat dijadikan dasar acuan baik bagi TNI dalam hal ini Personel Kowil untuk membantu Pemda. Dengan adanya kebijakan berupa PP tersebut, menjadikan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kowil mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik kepada Kowil itu sendiri, maupun Pemda yang dijadikan pegangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran program-program kesejahteraan rakyat yang juga disinegikan dengan program membangun ketahanan wilayah di daerah.

Kedua, melalui *sosialisasi* tentang metode Binter yang meliputi Bhakti TNI, Bintahwil dan Binkomsos kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang pentingnya ketiga metode binter tersebut untuk membantu Pemda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang Binter kepada Pemda, akan menjadikan lebih mudah bagi pihak Pemda untuk menerima dan mendukung program-program Binter yang ditawarkan oleh pihak Kowil.

Ketiga, melalui *latihan dan pendidikan* kepada personel kowil yang berhubungan dengan penyelenggaraan Bhakti TNI, Bintahwil dan Binkomsos. Materi latihan dititik beratkan pada kemampuan menyelenggarakan administrasi dan koordinasi lintas sektoral serta kemampuan berkomunikasi yang efektif. Latihan dan pendidikan ini dirasa sangat penting sebagai modal dasar personel Kowil dalam bertugas, karena dari kemampuan orang perorang personel Kowil inilah dapat merepresentasikan kinerja kowil dalam membantu tugas pemerintah daerah.

Keempat, melalui *evaluasi dan revisi piranti lunak* yang mengatur tentang penyelenggaraan Binter, agar pelaksanaan Binter selalu *up to date* dengan situasi dan kondisi terkini dengan pengoperasionalnya mencantumkan pelibatan Pemda secara proporsional yang mengoptimalkan mekanisme hubungan kerja antara Pemda dan Kowil yang terkoordinasi dan terintegrasi. Langkah ini menjadi penting, karena perkembangan lingkungan strategis menyebabkan banyak sekali perubahan dan dinamika kehidupan yang perlu diselaraskan satu sama lainnya, demikian pula halnya dengan piranti lunak yang dimiliki oleh Kowil yang dijadikan dasar pegangan mereka merencanakan dan melaksanakan Binter, tentunya juga harus selaras dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Keempat langkah tersebut membutuhkan arahan dari komando atas dalam pelaksana dilapangan. Dalam hal kebijakan, tentunya yang lebih berperan adalah Kasad sebagai pemegang kebijakan tertinggi di TNI AD, sedangkan sosialisasi dapat dilakukan oleh pejabat kowil dari mulai Pangdam sampai dengan Dandim sesuai dengan tataran kewenangannya. Pada bagian pendidikan dan latihan serta evaluasi dan revisi, domain kewenangannya berada pada LKT (Lapangan Kerja Taktis) dalam hal ini adalah Pusterad. Diharapkan dengan menerapkan solusi tersebut diatas, maka permasalahan disekitar Bhakti TNI dapat teratasi dan pelaksanaan Binter akan lebih optimal di masa mendatang.

b. Pembinaan Teritorial Terhadap Kemampuan Menempatkan Komunikasi Sebagai Kemampuan

Bagi TNI pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan dengan cara pembinaan teritorial. Adapun dalam implementasi, kita masih mendapatkan hambatan/kendala :

- 1). Konsepsi Sishanta masih bergerak pada tataran filosofis, belum implementatif.

- 2). Keterbatasan anggota untuk melengkapi alut sista dan keterbatasan dana, khususnya minimnya gaji prajurit dan anggaran untuk latihan, pendidikan dan lain-lainnya.
- 3). Tingkat kedewasaan sebagian politisi sipil yang belum matang antara lain masih cenderung menarik-narik TNI/unsur TNI untuk ikut politik praktis.
- 4). Masih lemahnya kesadaran bela negara di kalangan masyarakat terutama kaum muda, padahal kesadaran tersebut merupakan fundamen Sishanta.
- 5). Bagi masyarakat luas wacana/pembahasan masalah Hankamnas dipandang seolah barang asing, sehingga masalah ini belum disentuh/diperhatikan, bahkan juga oleh komunitas intelektual/akamedisi.
- 6). Secara kuantitatif masih kurang pakar sipil yang mendalam masalah Hankam oleh karena itu perlu dibuka program studi kajian pertahanan di perguruan tinggi nasional sehingga menghasilkan pakar dengan muatan nasional yang tebal bukan mengusung teori-teori akademis dari luar negeri/barat.

Mencermati kondisi aktual di lapangan, maka dapat diidentifikasi dan menginventarisir beberapa permasalahan di antaranya adalah :

- 1). Kurangnya pemahaman tentang Binter secara luas.
- 2). Belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan masing-masing departemen atau pemerintah daerah melakukan secara konkrit pembangunan di bidang masing-masing yang terkait dengan kepentingan pertahanan.
- 3). Khusus dalam upaya mengoptimalisasi peran TNI sebagai komponen utama pertahanan negara (dalam hal Binter). Apakah jumlah dan kualitas personil (SDM) yg ada sudah memadai. Apakah Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) sudah memadai sesuai dengan perkembangan senjata teknologi modern.

Beberapa arah kebijakan yang perlu diformulasikan sebagai solusi, diantaranya:

1. Menumbuh-kembangkan kesadaran dan pemahaman setiap warga negara tentang bela negara, kecintaan terhadap Tanah Air (Sishaneg dan Binter).
 2. Mendorong kemauan Politik Elit (pengelola dan penyelenggara negara).
 - a) Peraturan Perundang-undangan sebagai payung hukum (keterlibatan setiap departemen dan pemerintah dalam bidang pertahanan).
 - b) Dana/Anggaran Bidang Pertahanan.
 3. Memperkokoh dan memelihara integritas dan kemandirian internal antar komponen TNI, serta TNI dan Rakyat.
 4. Membangun TNI yang tangguh/profesional, efektif, dan modern.
- Peran Binter TNI AD sebagai salah satu kegiatan utama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dan mewujudkan kemandirian TNI–Rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD dalam sistem pertahanan negara.

c. Pembinaan Paradigam TNI dengan mengedepankan Komunikasi sebagai metode

Dasar pemikiran refungsionalisasi dan restrukturisasi teritorial itu sendiri didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat Indonesia masa depan yang hendak kita bangun adalah masyarakat madani yang demokratis dan modern. Dengan demikian perlu konsep yang matang melalui proses perencanaan yang terpadu dan komprehensif, mempertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.

Pengalihan fungsi Binter tidak selalu mengandung konsekuensi pembubaran Koter. Walaupun fungsi teritorial secara bertahap dialihkan kepada institusi fungsional, Koter masih diperlukan untuk

menyelenggarakan fungsi pertahanan atau fungsi tentara, karena fungsi ini sesuai undang-undang tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah.

Dalam kondisi seperti ini TNI dituntut tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama komponen bangsa lainnya memantau, memelihara dan menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara integritas nasional dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45 Keberadaan Koter/Apter Masih Relevan dengan Kebutuhan.

Sebagai alat negara yang disiapkan menghadapi musuh dari luar, ada sebagian kecil kalangan yang merasa keberadaan Koter/Apter tidak diperlukan lagi di era reformasi ini. TNI memahami pendapat tersebut namun situasi transisi sekarang ini bukan saat yang tepat, TNI meninggalkan fungsi teritorialnya. Doktrin Hankamrata mensyaratkan TNI sebagai kekuatan inti yang ditopang kekuatan dasar rakyat terlatih, komponen cadangan dan komponen pendukung sarana prasarana. Hal tersebut mengisyaratkan ada hubungan yang erat, harmonis, sejiwa dan manunggal antara TNI dengan rakyat. Panglima Besar Jenderal Soedirman pernah menyatakan :” Tentara bukan merupakan satu golongan diluar masyarakat, bukan pula suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat, tetapi tidak lain dan tidak lebih adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu, seperti bagian-bagian lain yaitu : tani, buruh, dan lain-lain juga mempunyai tugas dan kewajiban tertentu ”.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Panglima Besar Soedirman, Jenderal Besar A.H. Nasution menyatakan : ”TNI bukan sekedar alat pemerintah sebagaimana yang berlaku di negara demokrasi Barat, bukan pula alat suatu partai sebagaimana yang ditentukan di negara komunis, apalagi semacam rejim militer yang mendominasi negara, TNI adalah alat perjuangan rakyat”. Kata-kata kedua Jenderal Besar tersebut mengisyaratkan refleksi historis dan pandangan jauh ke depan, mewaspadaikan komitmen integritas dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Memarginalkan TNI dari rakyat hanya akan memberikan peluang bagi musuh negara untuk “*merongrong*” rakyat agar memusuhi negaranya dan sekaligus menceraikan beraikan persatuan nasional. Kondisi demikian akan membuka kesempatan gerakan sparatis mengaktualisasikan diri dan mengembangkan kekuatannya. Bilamana hal ini terjadi resikonya sangat mahal, disintegrasi bangsa. Pemikiran agar peran fungsi TNI “dilokalisir” dapat dipahami dari dua sisi : Pertama adalah idealis sesuai profesionalisme militer, tanpa melihat faktor kesejarahan, doktrin Hankamrata dan lain-lain. Kedua adalah pemikiran emosional yang dilandasi pengalaman traumatik represi militer di masa Orde Baru.

Kedua pemikiran ini harus disikapi TNI secara dewasa dengan kebesaran jiwa sesuai tuntutan reformasi. Dalam hal ini TNI sudah siap secara moral untuk menerimanya, namun demikian tanggung jawabnya selaku pengawal negara tidak mau mengambil resiko meninggalkan tanggung jawabnya.

d. Pembinaan Paradigam TNI dengan mengedepankan Komunikasi sebagai kemampuan

Bagi seorang pejabat teritorial yang masih terobsesi masa lalu dapat dipahami kalau jabatan teritorial (Dandim dan Danramil) sekarang tidak lagi begitu menarik. Namun bagi seorang prajurit pejuang, justru situasi dan kondisi demikian akan menjadi suatu tantangan bagaimana Apter sekarang harus berkiprah, bagaimana harus menyikapi situasi dan kondisi yang sulit dan bekal kemampuan apa yang harus dimiliki agar dapat tampil serta kiprah perannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan menyangkut penampilan sikap, pengetahuan dan kemampuan/keterampilan adalah sebagai berikut :

- 1). Penampilan adalah cermin kepribadian. Kesan pertama seseorang terhadap diri kita adalah dari sosok penampilan, kemudian sikap, tutur kata dan sebagainya. Penampilan yang rapi, sikap yang sabar namun tegas, tutur kata yang ramah dan sopan santun dalam berbicara memberikan kesan pertama yang baik dan citra diri positif yang akan

mengundang apresiasi masyarakat terhadap seseorang pejabat teritorial. Untuk memperoleh penampilan yang baik ini tidak sulit yang penting ada kemauan karena TNI sudah memiliki pedoman Sapta-marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Sikap yang “korek”, sabar namun tegas, perhatian, tidak ragu-ragu serta “tanggap, tanggung dan trengginas” dalam menghadapi setiap persoalan akan memberikan “*credit point*” yang bagus. Bilamana ketiga pedoman hidup TNI di atas dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari, di-sertai sikap yang baik, maka ia bukan saja dapat diterima kehadirannya, tetapi akan menjadikannya sosok prajurit teladan.

- 2). Pengetahuan. Pengetahuan yang luas terutama menyangkut bidang dan medan tugasnya akan memperluas wawasan dan cakrawala berfikir seorang Apter. Dengan itu, seorang Apter akan dapat bertindak proaktif dan antisipatif serta memberikan ide-ide atau konsep pemecahan masalah atau pemberdayaan potensi masyarakat kepada Pemda, Instansi fungsional dan pihak-pihak lainnya secara tepat dengan penuh percaya diri. Sehingga dia juga tidak gentar untuk berdebat dengan siapa saja.
- 3). Pengamat dan Pendengar yang baik. Seorang Apter di era reformasi dituntut banyak bergerak mengamati situasi, jadi pendengar yang baik untuk menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat dan menyalurkan serta membicarakannya dengan pihak terkait. Sehari-hari bila perlu dapat terjun di tengah-tengah komunitas rakyat miskin dengan cara menyamar. Hal ini penting, karena komunitas miskin ini sering menjadi obyek binaan gerakan sparatis dan kelompok ekstrimis (Ekki, Ekka dan Ekla). Dengan menjadi seorang pengamat dan pendengar yang baik, seorang pejabat/Apter akan mengetahui hakekat permasalahan yang terjadi di daerahnya. Dengan pemahaman yang akurat atas latar belakang masalah, maka ia akan dapat memberikan alternatif solusi masalah yang tepat.
- 4). Memahami Bidang Hukum. HAM dan Lingkungan Hidup. Di era reformasi, penegakan hukum hak azasi manusia/HAM dan lingkungan hidup merupakan tuntutan yang mengemuka. Oleh karena itu seorang pejabat/Apter harus memahami ketiga bidang tersebut diatas.
- 5). Hukum. Untuk menghindari agar tidak bertindak diluar kewenangannya dan menyikapi segala persoalan yang terjadi dari sudut pandang hukum, maka ia harus “melek” hukum dan “concern” menegakkannya.
- 6). HAM. Untuk menghindari agar ia tidak dituduh melanggar HAM dalam tindakannya dan dapat menilai peristiwa pelanggaran HAM, maka ia harus paham kaidah-kaidah HAM.
- 7). Lingkungan Hidup. Pemahaman aspek lingkungan hidup perlu dimiliki oleh seorang pejabat/Apter. Karena lingkungan hidup merupakan ruang tempat manusia berkiprah dan mencari nafkah sepanjang hidup. Oleh karena itu setiap orang harus memahami dan sadar atas pentingnya upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam pengertian

“pelestarian lingkungan hidup” mengandung makna, tidak mengeksploitasinya secara berlebihan dan dilakukan dengan cara yang benar, tidak mengotorinya, menjaga keseimbangan komunitas manusia, flora, fauna yang ada di suatu lingkungan.

- 8). Keterampilan, yang dimaksud adalah bagaimana seorang Apter trampil menilai dan menyimpulkan masalah yang terjadi, kemudian mengkoordinasikannya dan membicarakannya dengan institusi yang tepat guna mendapatkan cara pemecahan masalah yang paling tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- 9). Pendekatan yang perlu dikedepankan. Seorang pejabat/Apter di era reformasi sebaiknya memiliki komitmen untuk berpegang pada beberapa pendekatan dalam melaksanakan tugasnya.
- 10). Pendekatan hukum, penegakkan hukum merupakan satu pesan reformasi yang harus ditegakkan karena selama hukum dapat dipertahankan atau “dibeli” oleh kalangan yang mampu, maka keadilan tak dapat ditegakkan.
- 11). Pendekatan kerja sama, di era reformasi, agar disadari bahwa TNI sudah mengakui bahwa fungsi Binter adalah fungsi pemerintahan. Dengan demikian yang bertanggung jawab adalah institusi/dinas pemerintahan daerah. Tugas seorang pejabat/Apter peran sertanya semata-mata untuk mengkoordinasikan dan mendorong berjalannya fungsi masing-masing lembaga fungsional.
- 12). Pendekatan Proaktif, perubahan kesibukan di satter-satter yang cenderung menurun harus disikapi secara proaktif (jemput bola). Buka mata, buka telinga, baca aspirasi publik, kumpulkan informasi, analisa, simpulkan dan koordinasikan. Itulah langkah-langkah pemecahan masalah yang proaktif. Tidak menunggu diundang dan tidak perlu sering mengundang. Karena sekarang dalam hal Binter, Koter bukan pelaku utama lagi.
- 13). Pendekatan Komunikasi, sekarang sarana komunikasi sangat beragam mulai dari penggunaan caraka, kentongan, telepon, radio sampai dengan teleconfren. Semua dapat digunakan dan dipilih sesuai derajat kepentingannya. Dengan sering berkomunikasi berarti juga berkoordinasi sehingga terjalin hubungan yang “familiar” dengan instansi fungsional.

Peran Lembaga/Instansi Pembina. Beberapa instansi pembina Koter/Apter secara hi-rarki mulai dari tingkat paling atas adalah Ster TNI, dibawahnya ada Ster TNI-AD. Selain itu ada Pusat Teritorial TNI-AD (Pusterad) dan di lingkungan pendidikan ada Pusdikter. Ster TNI dan Ster-AD adalah instansi yang memiliki kewenangan fungsi pembinaan Koter/Apter yang mengeluarkan kebijakan strategis. Kebijakan-kebijakan itu dijabarkan lebih lanjut oleh Pusterad dalam bentuk antara lain buku-

buku petunjuk operasional sebagai pedoman Apter di lapangan dan pedoman bahan ajaran di lembaga-lembaga pendidikan TNI.

Sehubungan dengan perubahan paradigma TNI di bidang teritorial telah menjadikan bahan kajian bagi lembaga teritorial dan lembaga pendidikan tertinggi TNI, untuk menyikapi bagaimana kiprah Koter/Apter pada era reformasi atau situasi transisi yang sedang krisis sekarang ini. Institusi yang berwenang dan bertanggung jawab mengkaji dan memproduksi pedoman teknis/bujuknis teritorial adalah Puster-AD, dituntut untuk mengkaji ulang dan merevisi pedoman bujukter yang sudah tidak sesuai lagi dan membuat bujukter baru yang sesuai dengan tuntutan reformasi/paradigma baru TNI. Pengkajian itu mencakup perbedaan antar wilayah dan karakter/tipologi daerah bagian ini menjadi bahan masukan dalam penataan kembali organisasi Koter yang didasarkan pada tipologi daerah masing-masing. Kinerja instansi Binter TNI diharapkan tidak menjadi surut atau mengendor hanya karena Binter telah disepakati bukan lagi tugas pokok TNI.

Dukungan rakyat yang masih ada dan oknum-oknum yang menghendaki Koter dibubarkan justru harus dijadikan pemicu dan pemacu upaya Binter oleh semua Strata Institusi Teritorial TNI. Dalam situasi-kondisi masyarakat yang sedang resah karena krisis berkepanjangan, para Apter diharapkan dapat memberikan gagasan yang tepat guna memecahkan masalah sekaligus mencegah gejolak sosial yang mengarah disintegrasi bangsa. Oleh karena itu Apter sekarang harus terdiri dari SDM muda berkualitas, berdedikasi, memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan serta wawasan kebangsaan yang kuat.

Di era otonomi daerah, dimana tumpuan utama otonomi berada didaerah Kabupaten/Kota, setiap Kodim dituntut untuk memahami karakteristik daerahnya dan menyusun pedoman khusus bagi para Apter setempat agar dapat menyikapi kekhususan-kekhususan yang menyangkut adat istiadat, pantangan, tradisi dan lain-lain. Dengan berbekal

pedoman/bujukter khusus ini diharapkan Apter berperilaku yang “pas” dan tidak menyimpang.

4.3.2. Eksternal

a. Pembinaan Teritorial Dalam menjawab Kemampuan Pembinaan penguasaan wilayah

Menyikapi fenomena terhadap ancaman disintegrasi bangsa yang bersumber dari terjadinya serangkaian konflik dalam kehidupan masyarakat dan goyahnya sendi-sendi kondisi sosial masyarakat, bila tidak dapat segera teratasi dan tertangani secara tuntas diprediksikan akan dapat merusak sistem pertahanan negara yang pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya instabilitas keamanan nasional.

Menghadapi situasi tersebut maka tuntutan mendesak yang perlu segera dilakukan adalah penanganan dan penyelesaian konflik, meniadakan serta meredam aksi *separatisme* dan mewujudkan ketahanan wilayah, tugas tersebut tidak mampu bila hanya dilakukan oleh salah satu komponen bangsa, tetapi lebih pada penanganan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan pemerintah termasuk TNI bersama dengan komponen bangsa lainnya.

TNI AD sebagai salah satu komponen TNI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pertahanan negara didarat dituntut untuk mampu mengatasi ancaman tersebut dengan mengoptimalkan fungsi pembinaan teritorial di tiap-tiap Komando Kewilayahan. Agar arah optimalisasi Pembinaan Teritorial mencapai kondisi yang diharapkan, maka konsekuensi yang perlu ditempuh adalah melakukan pembinaan kedalam organisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, ditempuh melalui upaya peningkatan profesionalisme personel teritorial yang meliputi peningkatan kemampuan teritorial dan pemahaman terhadap hakekat ancaman, sedang pembinaan terhadap masyarakat ditempuh melalui

penerapan pembinaan teritorial yang tepat dan terarah yang mengacu kepada trend perkembangan ancaman.

b. Pembinaan Teritorial Dalam menjawab Kemampuan Penugasan wilayah

Komando Kewilayahan yang merupakan gelar kekuatan TNI AD, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya, tujuannya adalah untuk mewujudkan daya tangkal dan ketangguhan suatu wilayah terhadap berbagai bentuk ancaman, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri yang akan mengancam keselamatan bangsa, kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mencermati perkembangan situasi nasional saat ini yang diwarnai oleh berbagai konflik serta ancaman disintegrasi bangsa, maka personel teritorial dituntut harus mampu memainkan peran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan senantiasa tetap berlandaskan pada koridor dan rambu hukum yang berlaku.

Belajar dari pengalaman, maka saat ini dan kedepan TNI harus mampu tampil secara profesional dan proporsional sesuai fungsi dan perannya sebagai alat negara dibidang pertahanan, oleh karenanya TNI harus kembali kepada jati dirinya sebagaimana yang telah di gariskan dalam UU No. 34 Th. 2004 tentang Peran TNI.]

c. Pembinaan Paradigam TNI dalam pengembangan Pembinaan penguasaan wilayah

Menyikapi fenomena terhadap ancaman disintegrasi bangsa yang bersumber dari terjadinya serangkaian konflik dalam kehidupan masyarakat dan goyahnya sendi-sendi kondisi sosial masyarakat, bila tidak dapat segera teratasi dan tertangani secara tuntas diprediksikan akan dapat merusak sistem pertahanan negara yang pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya instabilitas keamanan nasional. Menghadapi

situasi tersebut maka tuntutan mendesak yang perlu segera dilakukan adalah penanganan dan penyelesaian konflik, meniadakan serta meredam aksi *separatisme* dan mewujudkan ketahanan wilayah, tugas tersebut tidak mampu bila hanya dilakukan oleh salah satu komponen bangsa, tetapi lebih pada penanganan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh personel pemerintah termasuk TNI bersama dengan komponen bangsa lainnya. TNI AD sebagai salah satu komponen TNI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pertahanan negara didarat dituntut untuk mampu mengatasi ancaman tersebut dengan mengoptimalkan fungsi pembinaan teritorial di tiap-tiap Komando Kewilayahan.

Agar arah optimalisasi Pembinaan Teritorial mencapai kondisi yang diharapkan, maka konsekuensi yang perlu ditempuh adalah melakukan pembinaan ke dalam organisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, ditempuh melalui upaya peningkatan *profesionalisme* personel teritorial yang meliputi peningkatan kemampuan teritorial dan pemahaman terhadap hakekat ancaman, sedang pembinaan terhadap masyarakat ditempuh melalui penerapan pembinaan teritorial yang tepat dan terarah yang mengacu kepada trend perkembangan ancaman.

Teori Perang menurut Sun Tzu. Dalam teori perang Sun Tzu, ia meletakkan dasar yang penting dalam profesionalisme berperang antara lain : kenali musuh dan kenali diri sendiri, maka anda bisa bertempur ribuan kali tanpa terancam kalah. Mengandung pengertian bahwa dalam menghadapi suatu pertempuran perlu diketahui secara pasti hakekat ancaman dan musuh yang akan dihadapi serta memahami kemampuan dan kekuatan pasukan sendiri untuk menghadapi perang. Sukses bukanlah melakukan apa yang perlu dilakukan. Sukses adalah “melampaui” apa yang perlu dilakukan. Agar sukses anda harus melampaui “aturan-aturan biasa” dan menetapkan standar-standar prestasi baru. Lalu anda harus memecahkan rekor anda sendiri. Apa yang sukses di masa lalu, mungkin tetap efektif di masa depan.

d Kemampuan deteksi dini dengan Pembinaan penguasaan wilayah

Dalam konteks menghadapi perkembangan situasi saat ini pembentukan opini publik merupakan faktor yang sangat dominan untuk dapat menguasai hati dan pikiran rakyat, mengingat vitalnya aspek tersebut maka penerapan komunikasi massa harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itulah dalam upaya mengoptimalkan hasil pembinaan teritorial maka kemampuan komunikasi massa ini perlu dibekalkan kepada personel teritorial yang bertugas di lapangan agar dapat dengan segera berkomunikasi secara efektif dan berdaya guna dengan segenap elemen masyarakat sehingga tercipta daya tangkal terhadap opini yang berkembang yang belum di yakini kebenarannya. Dalam struktur budaya bangsa Indonesia, tokoh masyarakat formal maupun non formal, memiliki peran sangat penting sebagai kunci kendali massa, maka sangat mungkin bila tokoh masyarakat dijadikan sasaran pembinaan oleh aktor state maupun aktor non state dalam situasi seperti saat ini, oleh karena itu kemampuan komunikasi massa terhadap tokoh masyarakat mutlak harus dimiliki oleh setiap personel teritorial Kodim dalam rangka pengendalian massa dan pelaksanaan tugas di lapangan.

Prinsip defensif aktif mencerminkan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia mengenai perang dan damai. Bangsa Indo-nesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya dan bangsa Indonesia tidak dapat membiarkan setiap usaha yang merongrong dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan keamanan pada hakekatnya adalah perlawanan rakyat semesta yang merupakan hasil upaya total yang mengintegrasikan segenap potensi dan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Setiap manusia Indonesia secara perorangan pada akhirnya akan merupakan subyek maupun obyek yang utama, karenanya harus dibekali dan diperkuat untuk dapat menjalankan peranannya, baik sebagai pelaku pembela negara maupun sebagai benteng pertahanan keamanan negara.

Dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai nasional sebagai bekal tangguh, dilengkapi dengan pengetahuan dan ketrampilan, diharapkan timbulnya spontanitas dan militansi segenap rakyat Indonesia dalam menghadapi setiap ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, dengan keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak mengenal menyerah. Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta memang merupakan daya tangkal yang dahsyat, baik terhadap ancaman dari luar negeri maupun terhadap gangguan dari dalam negeri.

Dengan kepentingan pembangunan nasional, maka berbagai hal perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hubungan ini dianut pemikiran, bahwa kemerdekaan sebagai hasil perjuangan dan pengorbanan seluruh rakyat, disertai pembangunan nasional yang telah menginvestasikan jerih payah dan uang rakyat yang sedemikian besarnya, menuntut agar tidak sejengkalpun dari wilayah nasional, termasuk segala kekayaan yang terkandung didalamnya jatuh ketangan pihak asing. Untuk itu TNI sebagai komponen utama kekuatan Hankamrata harus ditingkatkan kemampuan operasionalnya, sehingga memiliki kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan yang tinggi dan mampu menghalau atau menghancurkan musuh yang ingin memasuki wilayah nasional pada garis batas yang melingkari wilayah Nusantara serta mengatasi gangguan terhadap keamanan dalam negeri, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

e. Kemampuan lapor cepat dan cegah dini dengan Pembinaan penguasaan wilayah

Luasnya bentangan wilayah pulau Sabang jika dihadapkan dengan kekuatan personel Kodim 0112/Sabang sangat tidak seimbang, pelaksanaan binter dengan kekuatan personel yang ada dituntut mampu memberikan jawaban dan jaminan kesiapan operasional secara mandiri diwilayah tanggung jawabnya dalam mengawal wilayah darat khususnya pulau terluar. Desa merupakan basis terdepan kekuatan pertahanan, oleh sebab itu Kodim 0112/Sabang sebagai satuan Kowil menggelar personelnnya sampai ketinggian desa untuk mengetahui seluk beluk wilayah

maupun kondisi masyarakat. Tugas pokok Kodim 0112/Sabang sebagai Komando kewilayahan adalah menyelenggarakan Binter dalam rangka pertahanan didarat dengan segala permasalahan baik dari dalam maupun dari luar serta mengidentifikasi tantangan tugas kedepan. Secara umum paling menonjol adalah Personel, dimana kekuatan personel belum mencukupi untuk memenuhi jumlah desa yang ada, hal ini sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan binter. Disisi lain tidak adanya satuan sandaran sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman. Pergeseran atau pengerahan pasukan akan mengalami hambatan dan kendala khususnya dari segi kecepatan.

Luasnya wilayah dengan segala SDA akan mendukung ekonomi diwilayah namun belum mendapat sentuhan dari tangan-tangan terampil maupun dari Pemerintah daerah setempat, selain itu letak pulau-pulau terluar di pulau Sabang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut, dimana pada waktu tertentu tidak dapat dilayari oleh kapal disebabkan badai.

Selain kerawanan tersebut daerah ini rawan terhadap penyusupan dan infiltrasi pihak asing. *Kedua ditinjau dari Demografi.* Penyebaran penduduk yang tidak merata terdapat pada daerah-daerah tertentu. Hal ini menyulitkan pelaksanaan binter secara ideal. Tokoh adat dan tokoh agama masih sangat dominan sehingga hukum adat lebih menonjol dibandingkan hukum pemerintahan. *Ketiga ditinjau dari Sosial budaya.* Secara umum masyarakat di Pulau Sabang memegang teguh adat-istiadat yang telah turun temurun yaitu hubungan kekeluargaan yang sangat.

Dalam menyelenggarakan binter di Kota Sabang, penempatan Apter harus dapat menjangkau hingga sampai Mukim dan Kampung dengan pertimbangan memperhatikan kemungkinan ancaman khususnya terhadap pulau terluar.

Kodim 0112/Sabang bersifat pro aktif dalam mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, peduli terhadap aspirasi yang berkembang dalam rangka mengendalikan dan menciptakan situasi

yang kondusif. Untuk mewujudkan kemandirian TNI-rakyat Kodim 0112/Sabang berikut jajaran senantiasa menjaga, membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga penampilan (Performance) serta menghilangkan sikap arogansi dengan memegang teguh motto “ BAIK- BAIK DENGAN RAKYAT

Pembinaan kedalam. Dilakukan dengan cara melaksanakan latihan ataupun pembinaan dalam rangka mengasah kemampuan guna membentuk prajurit yang berkualitas dan dicintai rakyat melalui latihan dalam satuan sesuai program dengan memanfaatkan Minggu Militer. Peningkatan disiplin melalui Jam Komandan, Santi aji agar Prajurit tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun buruknya citra TNI dimata masyarakat serta menerapkan sistem *Reward and Punishment*, pemberian penghargaan kepada Prajurit yang berprestasi dan menjatuhkan sanksi bagi Prajurit yang melakukan pelanggaran. Selain itu memberikan penekanan kepada anggota agar senantiasa berperilaku santun terhadap masyarakat dengan menghindari sikap arogansi serta wajib melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sedangkan pada waktu tertentu Pimpinan maupun Staf beserta Ibu-Ibu Persit melakukan kunjungan kedaerah-daerah dengan maksud untuk mendengar secara langsung dari masyarakat tentang perilaku anggota dan melihat langsung kondisi anggota dilapangan serta memberikan bekal pengetahuan baik melalui penataran, mengikuti pendidikan/kursus agar dalam bertugas memiliki kepedulian terhadap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pembinaan keluar, dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian TNI-rakyat diwilayah tanggung jawab Kodim 0112/Sabang khususnya didaerah pulau terluar berdasarkan aspek Geografi, Demografi dan kondisi sosial, upaya yang dilaksanakan dalam pembinaan teritorial adalah sebagai berikut : *Pertama menjawab permasalahan* geografi. Banyaknya pulau terluar yang tersebar serta luasnya wilayah binaan maka dilaksanakan gelar kekuatan satuan organik dengan menempatkan Babinsa di strata terdepan sebagai ujung tombak dan

mata telinga satuan. Penempatan Babinsa bertujuan untuk melakukan pembinaan sesuai program dan perkembangan situasi diwilayah tanggung jawabnya agar semua potensi yang ada menjadi kekuatan dan membentuk kantong- kantong pertahanan.

Posisi pulau terluar yang tersebar hanya dapat ditempuh dengan kapal/ perahu/ speed boat akan menyulitkan menjangkau setiap jengkal daerah sehingga langkah yang diambil adalah merencanakan patroli rutin dengan skala waktu tertentu dilaksanakan oleh Koramil setempat. Melakukan kegiatan karya bhakti dan bhakti sosial dalam rangka membuka jalan-jalan penghubung antar desa sekaligus menciptakan kemanunggalan TNI-rakyat.

Kedua menjawab permasalahan demografi. Keadaan penduduk yang tersebar tidak merata, upaya yang diambil adalah mendatangi masyarakat dengan melakukan anjangsana, membentuk desa binaan dan melakukan kegiatan sosial dengan sasaran yang menyentuh dalam rangka merebut hati rakyat. Pada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dilakukan dengan cara membentuk mitra juga melakukan pendataan di tiap-tiap desa/ kampung/ dusun bagi penduduk yang hidup berpencar-pencar agar memudahkan pengendalian untuk menghimpun kekuatan rakyat serta memberikan penyuluhan bela negara, keberadaan Kowil diwilayah, cinta tanah air, dll kepada masyarakat dengan memanfaatkan event/ moment Karya bhakti, TMMD, pesta perkawinan ataupun hajatan lainnya.

Ketiga menjawab permasalahan sosial budaya adalah memberdayakan komponen yang tersedia untuk memberikan penyuluhan, agar masyarakat tidak terpengaruh dengan Idiologi lain dan tetap setia kepada Pancasila serta memberdayakan atau mengedepankan personel fungsional seperti tokoh masyarakat maupun kelompok intelektual dengan tujuan agar tidak mempolitisir masyarakat sehingga tidak terjadi kesimpang siuran arti demokrasi ataupun memprovokasi masyarakat agar membenci TNI.

Keempat menjawab permasalahan Hankam. Melakukan pengendalian terhadap setiap personel Kodim 0112/Sabang agar senantiasa siap menghadapi berbagai permasalahan AGHT dengan cara aktif melakukan deteksi dini cegah dini guna terhindar dari ancaman bersifat pendadakan. Memberdayakan Temu cepat lapor cepat terhadap setiap permasalahan yang timbul agar dapat diambil langkah- langkah penanganan sedini mungkin. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Pam Swakarsa sehingga dapat bertindak sebagai perpanjangan mata telinga.

f. Kemampuan penggunaan manajemen teritorial dengan Pembinaan penguasaan wilayah

Binter diselenggarakan sepanjang masa, baik dalam keadaan damai, Darurat sipil, Darurat militer maupun perang dengan tujuan menyiapkan Komponen cadangan, pendukung yang tangguh. Binter diselenggarakan dalam bentuk GiatTer, dengan Bhakti TNI, Bintahwil dan Komsos sesuai dengan mekanisme dan tatalaksana Binter. Binter pada eskalasi yang meningkat dilakukan dengan meningkatkan GiatTer, dilaksanakan dalam bentuk operasi peningkatan Binter untuk mewujudkan sasaran Binter disuatu daerah yang dibatasi oleh waktu, Sasaran, Dukungan dan adanya perintah.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan teritorial untuk kepentingan pertahanan negara aspek darat di wilayah Sabang tugas Kodim 0112/Sabang adalah.

1. Melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan potensi wilayah Sabang menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini sesuai sistem pertahanan semesta.
2. Meningkatkan kegiatan pembinaan teritorial melalui Bhakti TNI, Binwanwil dan Binkomsos untuk memelihara Kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Sabang .
3. Meningkatkan kualitas kemampuan personel Kowil khususnya Babinsa jajaran Kodim 0112/Sabang dalam rangka pencapaian tugas pokok.
4. Menyiapkan personel dan satuan untuk melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan (*Civic Mission*) dan Bhakti TNI.

Sebagai Satuan Komando Kewilayahan dalam menyelenggarakan pembinaan teritorial, tugas Kodim 0112/Sabang memberdayakan wilayah pertahanan didarat, yang dilakukan melalui metode pembinaan teritorial memiliki tantangan yang sangat besar dan kompleks, untuk itu organisasi mengharapkan agar pembinaan teritorial harus benar-benar dilaksanakan secara kontinyu, sesuai dengan program yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi lainnya. Komandan Kodim 0112/Sabang mengharapkan kepada seluruh komponen yang ada secara bersama-sama, bahu membahu dan terus menciptakan serta menyatukan sikap, guna membangun Sabang kedepan agar lebih maju dan bermartabat.

Dari itu, organisasi berharap agar satuan ini dapat memahami dan mengimplementasikan tugasnya dengan baik dan benar sesuai undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Mencermati situasi propinsi Aceh secara umum mengarah kepada kondisi yang semakin aman, bahkan membawa dampak yang positif bagi kelancaran pembangunan di wilayah Aceh pada umumnya dan Sabang pada khususnya, hal ini dapat dirasakan masyarakat, yang mana bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tanpa adanya gangguan dan hambatan.

4.4. Pembahasan

Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat bagi kelancaran berlangsungnya pembangunan nasional. Intensitas gejolak politik yang semakin meningkat telah menimbulkan hambatan bagi tercapainya rasa aman dan tenteram yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan bila berkelanjutan dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini menjadi sangat dilematis apabila dihadapkan dengan keterbatasan dan hambatan yang dihadapi aparat yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan, ditempuh kebijakan pembangunan melalui program pengembangan pertahanan negara, khususnya berkenaan dengan Binkomsos, terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana maka hal terpenting dalam proses pembinaan teritorial TNI AD di wilayah Sabang meliputi:

Faktor Internal

- a. Upaya revitalisasi dan reaktualisasi secara kultural maupun konseptual untuk menghilangkan dikotomi 'Pembina vs yang dibina
- b. *Sosialisasi* tentang metode Binter yang meliputi Bhakti TNI, Bintahwil dan Binkomsos
- c. Peningkatan personel khususnya atas penampilan sikap, pengetahuan dan kemampuan/keterampilan
- d. Kemampuan komunikasi massa ini perlu dibekalkan kepada personel teritorial yang bertugas di lapangan agar dapat dengan segera berkomunikasi secara efektif dan berdaya guna dengan segenap elemen masyarakat
- e. Penempatan Apter harus dapat menjangkau hingga sampai ke pelosok desa dengan pertimbangan memperhatikan kemungkinan ancaman khususnya terhadap mobilisasi orang dan barang secara ilegal mengingat sabang sebagai pintu utama.

Faktor Eketernal

- a. Pro aktif dalam mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, peduli terhadap aspirasi yang berkembang dalam rangka mengendalikan dan menciptakan situasi yang kondusif.
- b. Penempatan babinsa bertujuan untuk melakukan pembinaan sesuai program dan perkembangan situasi di wilayah tanggung jawabnya agar semua potensi yang ada menjadi kekuatan dan membentuk kantong-kantong pertahanan.

- c. pembinaan kedalam organisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, ditempuh melalui upaya peningkatan profesionalisme personel teritorial yang meliputi peningkatan kemampuan teritorial dan pemahaman terhadap hakekat ancaman, sedang pembinaan terhadap masyarakat ditempuh melalui penerapan metoda pembinaan teritorial yang tepat dan terarah yang mengacu kepada trend perkembangan ancaman
- d. Penanganan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh personelur pemerintah (patnership)
- e. Meningkatkan kegiatan pembinaan teritorial melalui Bhakti TNI, Binwanwil dan Binkomsos untuk memelihara Kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Sabang .
- f. Meningkatkan kualitas kemampuan personel Kowil khususnya Babinsa jajaran Kodim 0112/Sabang dalam rangka pencapaian tugas pokok.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan interpretasi terhadap Pembinaan Teritorial Pasca Perjanjian Helsinki dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan terhadap nilai-nilai integrasi perjanjian Helsinki dengan pembinaan teritorial dalam program TNI Angkatan Darat khususnya yang dilaksanakan Kodim 0112/ Sabang dengan menggunakan pendekatan Pembinaan Komsos melalui ; Sikap perilaku personal, Kemampuan personal dan konsep *partnership*, dari hasil pengolahan terhadap 7 kelurahan dan 1 organisasi Keluarga Besar TNI dan Lembaga Sosial Masyarakat secara umum menyatakan bahwa dimensi sikap perilaku personel dengan penilaian rata-rata cukup baik, terhadap kemampuan personal dalam melakukan pembinaan juga dirasakan cukup baik walau, masih ada hambatan baik teknis maupun non teknis, serta untuk dimensi konsep *partnership*, terlihat cukup baik walau dalam dimensi ini belum adanya ikatan yang kokoh dan terintergal antara pemerintah daerah dengan pelaksana pembinaan teritorial TNI AD dalam hal ini Kodim 0122/Sabang.
2. Terhadap kekuatan dan kelemahan pembinaan teritorial dari sisi strategi memperlihatkan bahwa faktor kelemahan meliputi; kemampuan deteksi dini, kemampuan lapor cepat dan cegah dini, pengamatan terhadap sumber dan anatomi konflik dalam masyarakat serta kemampuan penggunaan manajemen teritorial, sedangkan kekuatan yang ada adalah; pembinaan teritorial dan pradigma baru TNI yang terus di sosialisasikan, sedangkan oppertinites (kesempatan) meliputi komunikasi sebagai metode dan komunikasi sebagai kemampuan. Terhadap tantangan kedepan dalam pembinaan teritorial Kodim 0112/ Sabang meliputi ; pembinaan wilayah dan kemampuan penugasan wilayah.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan di lapangan maka saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk memperkuat implementasi pembinaan teritorial, hal yang harus diperhatikan adalah
 - a. Upaya revitalisasi dan reaktualisasi secara kultural maupun konseptual untuk menghilangkan dikotomi 'Pembina vs yang dibina
 - b. *Sosialisasi* tentang metode Binter yang meliputi Bhakti TNI, Bintahwil dan Binkomsos
 - c. Peningkatan personel khususnya atas penampilan sikap, pengetahuan dan kemampuan/keterampilan
 - d. pembinaan kedalam organisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, ditempuh melalui upaya peningkatan profesionalisme personel teritorial yang meliputi peningkatan kemampuan teritorial dan pemahaman terhadap hakekat ancaman, sedang pembinaan terhadap masyarakat ditempuh melalui penerapan metoda pembinaan teritorial yang tepat dan terarah yang mengacu kepada trend perkembangan ancaman
 - e. Penanganan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh personelu pemerintah (*patnership*)
3. Sedangkan terhadap faktor kelemahan baik dalam kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan personal dalam pembinaan teritorial adalah :
 - a. Kemampuan komunikasi massa ini perlu dibekalkan kepada personel teritorial yang bertugas di lapangan agar dapat dengan segera berkomunikasi secara efektif dan berdaya guna dengan segenap elemen masyarakat
 - b. Penempatan Apter harus dapat menjangkau hingga sampai ke pelosok desa dengan pertimbangan memperhatikan kemungkinan ancaman khususnya terhadap mobilisasi orang dan barang secara ilegal mengingat sabang sebagai pintu utama.

- c. Pro aktif dalam mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, peduli terhadap aspirasi yang berkembang dalam rangka mengendalikan dan menciptakan situasi yang kondusif.
- d. Penempatan Babinsa bertujuan untuk melakukan pembinaan sesuai program dan perkembangan situasi di wilayah tanggung jawabnya agar semua potensi yang ada menjadi kekuatan dan membentuk kantong-kantong pertahanan.
- e. Meningkatkan kegiatan pembinaan teritorial melalui Bhakti TNI, Binwanwil dan Binkomsos untuk memelihara Kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Sabang.
- f. Meningkatkan kualitas kemampuan personel Kowil khususnya Babinsa jajaran Kodim 0112/Sabang dalam rangka pencapaian tugas pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadurachman Oemi.2001, *Dasar-dasar Public Relations*, Citra Aditia Bakti, Bandung
- Aall, Pamela.1996 “*Nongovernmental Organizations and Peacemaking*” dalam Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*, Washington, D.C.: USIP Press.
- Anderson, Mary B.1996. “*Humanitarian NGOs in Conflict Intervention*” dalam Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* Washington, D.C.: USIP Press.
- Astrid, Susanto,2000. *Sosiologi dan Komunikasi Kemasryakatan*, Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Aris Munandar, 2008. *Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Kajian Politik.Jakarta. Program Magister Ilmu Politik Universitas Nasional.
- Ali Syariati, Tugas Cendikiawan Muslim, hal.158, Grafindo Persada, 2001
- Budiono Kusumohamidjojo.1997, *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis*, Binacipta. Jakarta.
- Bergear, O.L & Nenharus,R.J,2000. *To Empower People*, Washington DC., American Enterprise Institute For Public Politics Research.
- Blake Warren W.2001, *Visionary Leadership*, San Francisco, Jossey-Bass In Publishers.
- Bloomfield, David.2000, Nupen, Charles., dan Haris, Peter.. “*Proses-proses Negosiasi*” dalam Haris, Peter dan Reilly, Ben. (eds.). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Negosiator* (Jakarta: International IDEA,
- Burton, John. Conflict,1990: *Resolution and Prevention*, London: MacMillan Press.

- Crocker, Chester A. 1996. "The Varieties of Intervention: Conditions for Success" dalam Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict*, Washington, D.C.: USIP Press, 1996.
- Conway, 1999. *Trans boundary Environmental Negotiation; New Approach to Global Compactions*. Jossey Bass, San Francisco
- Djakapermana RD dan Priyono G. 2003, *Pengembangan Kualitas Wilayah dan Konteks Pemantapan Keutuhan Wilayah*. Dalam Buku; *Manajemen Otonomi Daerah, Biokrasi Keuangan Ekonomi Sosial*. Jakarta. Penerbit LSKPI Cetakan Ke Dua.
- Djakapermana RD, 2006, *Disan Kebijakan dan Strategi Dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Pulau Kalimantan*. Disertasi Program Doktor Sps. IPB. Bogor.
- Djakapermana RD dan Djumantri M, 2002. *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia ; pergeseran Pendekatan dalam Perencanaan Pengembangan Wilayah/Kawasan di Indonesia*, Bogor. Departemen Planologi ITB dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Bandung
- Edward T Hall, Welled R Hall, 2000. *Caste in Contemporary, India, Beyond Organic Solidarity*, Illinois, Waveland Press.
- Goodman. 1998, *Emplacement ;The Politics of Alternative Development*, Cambridge, Blackwell
- George Edwards, Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2001. *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman offset & Yayasan Administrasi Publik Indonesia.
- George, Jenifer M., Gareth R Jones. 2002, *Organizational Behavior*, 3rd edition, Prentice Hall International Incorporation, New Jersey.
- Helmut Dahm, 1980 "The Function and Efficacy of Ideology," *Journal of Studies in East European Thought*, Volume 21, Number 2 / May
- James N Rosenau. 1976, "The Road to European Union", Bon : The Foreign Office of The Federal Republic of Germany.
- Jabri, Vivienne. 1996. *Discourse on violence: Conflict analysis reconsidered* Manchester: Manchester University Press
- Jalaldudin Rachmat. 2008, *Komunikasi Massa*, Bandung. Remaja Rosda.

- James Fulcher.2004, *Capitalism: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press,
- Krech, Crutchfield.1999, *The Global Environment; Institute, Law and Policy*, London; Earthscan
- Kriesberg, Louis.1998, *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution* New York: Rowman & Littlefield, Publ
- Lister and Kay, 2001, Lister N, dan JJ Kay, *Celebrating Diversity, Adaptive Planning and Biodiversity Conservation*. Canada. Brodview.
- Loescher, Gil dan Dowty, Alan.1996, "Refugee Flows as Grounds for International Action" *International Security*, Vol.2, No.1.
- Lurance M Miller,2001, *Confronting Environmental Change in East & Southeast Asia; Eco-Politics, Foreign Policy and Sustainable Development*, Tokyo; United Nations University. Press.
- Miall, Hugh. (et.al.).2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola da Mengubah Konlik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nastir.M.2000, *Metodologi Penelitian*.Ghalia Indonesia. Jakarta
- Nugroho Notosusanto.1984, *Sejarah dan Sejarawan*, PN Balai Pustaka.
- Omar Hamalik.1995, *Studi Pengetahuan Sosial*, Bandung ; Madar Maju CV
- RM Sunardi.2005, *Pembinaan kebangsaan Indonesia*, PT Kuarternika Adidarma Jakarta
- Reily, Ben.2000 "Katup-katup Demokratis bagi Pengelolaan Konflik" dalam *Haris, Peter dan Reilly, Ben. (eds.). Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Negosiator* Jakarta: International IDEA.
- Rothman, J.1992, *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict*, Newbury Park, CA: Sage.

- Robertson, P. J., Roberts, D. R., dan Porras, J. I.2000, "Dynamics of Planned Organizational Change: Assessing Empirical Support for a Theoretical Model," *Academy of Management Journal*.
- RH Saragih., J Sirait, M Simamora.1987, *Sejarah Nasional*, Erlangga. Jakarta
- Sampson, Cynthia.1997, "*Religion and Peacebuilding*" dalam Zartman, William I. dan Rasmussen, J,L.. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques* Washington, D.C.: USIP.
- Saifuddin Duhri.2005, *Filsafat Aceh*, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Banda Aceh.
- Sarlito, Wirawan. 2000. *Sosiologi Kemasyarakatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Selznick, P.1999, "Foundation of the Theory of Organizations", *American Sociological Review*
- S.Djuarsa Sendjaja,1999. *Teori Komunikasi, Materi Pokok. Modul 1-9*, Jakarta. Universitas Terbuka.
- Sogiono.2004, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alpha Betta. Bandung.
- Soe_Hok_Gie.2004, *Hubungan Sejarah Aceh dan Tiongkok, Perjalanan Sejarah*, Pelita Harapan. Semarang.
- Sueprpto.2000, *Hubungan Internasional, Sistem Interaksi dan Perilaku*, Rajawali Press. Jakarta.
- Sudarsono, *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Era Otonomi Daerah* dalam Seminar Nasional Menyiapkan Pertahanan Negara Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam rangka Mengamankan Kepentingan Nasional bersama Komponen Bangsa Lainnya, FKUI - Jakarta, 2008.
- Steele, F.1998., *Making and Managing High-Quality Workplaces: An Organizational Ecology*, New York: Teachers College Press.
- Yuddy Chrisnadi.2003. *Reformasi TNI, Presfektif Baru Hubungan Siplin Militer di Indonesia*. LP3ES Jakarta.2003 hlm 32

Wibowo, Agus Budi.2004. *Hikayat dalam Perspektif Sejarah*” dalam Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Ragam Sejarah Aceh*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Widjajanto, Andi.2001, “*Dinamika Keamanan Pasca Orde Baru*”, *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol.1, No.7,

Wight, Martin.1996,. *International Theory: The Three Traditions*, London: Leicester University Press.

Wiener, Y.2000, “Forms of Values Systems: A Focus on Organizational Effectiveness and Cultural Change and Maintenance”, *Academy of Management Review*.

Zartman, William I. dan Touval, Saadia.1996, “*International Mediation in the Post-Cold War Era*” dalam Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* Washington, D.C.: USIP Press.

Zatman, William I.1985,. *Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa* New York: Oxford University Press.

Dokumen-Dokumen

Pusterad.2003, *Surat Keputusan Danpusterad Nomor: Skep/21/XII/2003 - Naskah Sementara Buku Petunjuk Pembinaan tentang Binter*, Jakarta

Mabesad.2002, *Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/384/X/2002 - Buku Petunjuk Induk tentang Binter*, Jakarta

Mabesad.2002, *Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/384/X/2002 - Buku Petunjuk Induk tentang Binter*, Jakarta

Mabesad.2002, *Surat Keputusan Kasad Nomor Skep / 228 / VII / 2002 - Buku Petunjuk Teknik tentang Komsos*, Jakarta

Suara Karya, Senin, 15 Agustus 2005

Dokumen. Lapidasi Atensi Nomor R/ /Lapat/I/2009.

Kompas, Oktober 15

Mabes TNI, 1998.

Tambahan

Mabes TNI, TNI abad XXI : Langkah-langkah Reformasi Internal TNI Lanjutan (Tahap II), Jakarta, 2001.

Lemhannas, Refungsionali-sasi Teritorial dalam rangka Pertahanan Negara, Jakarta, 2001.

Mabes TNI, Implementasi Paradigma Baru TNI dalam Berbagai Keadaan Mutakhir, Jakarta, 2001.

-----, Petunjuk Induk ABRI tentang Operasi Teritorial, Jakarta, 1996.

-----, Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan Teritorial Tahun 1994-1998, Jakarta, 1995.

Dep. Pertahanan Keamanan RI, Petunjuk Angkatan Bersenjata tentang Peranan Apter dalam Proyek KKN, Jakarta, 1984.

Kaster TNI, Ceramah pada Rapat Koordinasi Teritorial Tahun 2001, Jakarta, 2001.

Salim Said, DR, Restrukturisasi Komando Teritorial suatu Tinjauan Politik, Makalah pada Rakorter TNI 2001.

Seskoad, Dimensi Perubahan Masyarakat Indonesia dalam Era Industrialisasi (Bunga Rampai), Bandung, 1994.

Sajidiman Soerjohadiprodjo, Restrukturisasi Fungsi Koter di Era Reformasi, (Makalah), Jakarta, 2001.